

**ANALISIS PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
TERHADAP NILAI PERUSAHAAN
(Studi Pada Perusahaan
Transportasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai
Gelar Kesarjanaan S-1 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis IIB Darmajaya
di Bandar Lampung



**Oleh :
Naila Yunita Anggreini
1512110195**

**JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
INFORMATICS & BUSINESS INSTITUTE DARMAJAYA
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK
ANALISIS PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
TERHADAP NILAI PERUSAHAAN
(Studi Pada Perusahaan
Transportasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia)

Oleh:
Naila Yunita Anggreini

Sektor yang konsisten mengalami kenaikan volume perdagangan saham setiap tahunnya ditunjukkan oleh sektor Infrastruktur, Utilitas & Transportasi. Hal tersebut ditunjukkan dengan terjadinya peningkatan sejak 2013 hingga 2016, meskipun nilainya masih di bawah sektor property dan mengalami penurunan pada 2017.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas, pertanggungjawaban, keterbukaan, kewajaran dan kemandirian terhadap nilai Perusahaan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain asosiatif, yaitu untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas dan variabel terikat, dengan analisis regresi linier berganda melalui program SPSS.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa akuntabilitas dan kemandirian berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan pertanggungjawaban, keterbukaan dan kewajaran tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini disebabkan oleh ada beberapa prinsip GCG belum mampu meningkatkan kinerja perusahaan sehingga berdampak pada rendahnya nilai perusahaan.

Kata kunci: *Good Corporate Governance*, Nilai Perusahaan.

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Kegunaan Penelitian.....	9
1.5. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II. LANDASAN TEORI	
2.1. Teori Keagenan.....	12
2.2. Nilai Perusahaan.....	15
2.2.1. Pengertian Nilai Perusahaan.....	15
2.2.2. Indikator Nilai Perusahaan.....	17
2.3. <i>Good Corporate Governance</i> (GCG).....	20
2.3.1. Pengertian <i>Good Corporate Governance</i> (GCG).....	20
2.3.2. Manfaat <i>Good Corporate Governance</i> (GCG).....	21
2.3.3. Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> (GCG).....	22
2.4. Penelitian Terdahulu.....	31
2.5. Pengembangan Hipotesis.....	32
2.5.1. Pengaruh Akuntabilitas (Kepemilikan Manajemen) Terhadap Nilai Perusahaan.....	32
2.5.2. Pengaruh Pertanggungjawaban (<i>Corporate Social Responsibility</i>) Terhadap Nilai Perusahaan.....	34
2.5.3. Pengaruh Keterbukaan (<i>Earning per Share</i>) Terhadap Nilai Perusahaan.....	34
2.5.4. Pengaruh Kewajaran (Kepemilikan Institusional) Terhadap Nilai Perusahaan.....	35
2.5.5. Pengaruh Kemandirian (Dewan Komisaris Independen) Terhadap Nilai Perusahaan.....	36
2.6. Kerangka Pemikiran.....	37
2.7. Hipotesis.....	38
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	
3.1. Jenis Penelitian.....	40
3.2. Sumber Data.....	40
3.3. Metode Pengumpulan Data.....	41
3.4. Populasi dan Sampel.....	42
3.4.1. Populasi.....	42
3.4.2. Sampel.....	42
3.5. Variabel Penelitian.....	44
3.6. Definisi Operasional Variabel.....	44

3.7. Metode Analisis Data.....	45
3.7.1. Statistik Deskriptif	45
3.7.2. Uji Asumsi Klasik	46
3.7.3. Analisis Regresi Linier Berganda	48
3.7.4. Uji t.....	48
3.8. Hipotesis Statistik.....	48
3.9. Kerangka Hipotesis Penelitian	53

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Data.....	54
4.1.1. Deskripsi Objek Penelitian.....	54
4.1.2. Deskripsi Variabel Penelitian.....	70
4.2. Hasil Penelitian	77
4.2.1. Analisis Statistik Deskriptif	77
4.2.2. Hasil Uji Persyaratan Analisis Data.....	79
4.2.3. Analisis Regresi Linier Berganda	82
4.2.4. Uji Hipotesis.....	84
4.3. Pembahasan.....	87
4.3.1. Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Nilai Perusahaan.....	87
4.3.2. Pengaruh Pertanggungjawaban Terhadap Nilai Perusahaan.....	89
4.3.3. Pengaruh Keterbukaan Terhadap Nilai Perusahaan.....	90
4.3.4. Pengaruh Kewajaran Terhadap Nilai Perusahaan.....	91
4.3.5. Pengaruh Kemandirian Terhadap Nilai Perusahaan.....	92

BAB V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan	94
5.2. Saran.....	94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Sujoko dan Soebiantoro (2007) bahwa nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang terkait erat dengan harga sahamnya, dalam hal ini mengandung arti bahwa ukuran keberhasilan manajemen perusahaan dilihat dari kemampuan perusahaan menyejahterakan para pemegang saham. Harga saham yang tinggi membuat nilai perusahaan juga tinggi, dan meningkatkan kepercayaan pasar tidak hanya terhadap kinerja perusahaan saat ini namun juga pada prospek perusahaan di masa mendatang terutama bagi pihak kreditur atau investor.

Nilai perusahaan bagi pihak kreditur erat kaitannya dengan nilai likuiditas perusahaan, yang mana perusahaan dinilai mampu atau tidaknya mengembalikan pinjaman yang diberikan oleh pihak kreditur. Apabila nilai perusahaan tersirat tidak baik maka investor akan menilai perusahaan dengan rendah. Dalam proses memaksimalkan nilai perusahaan, akan ada konflik antara kepentingan manajer dan pemegang saham (pemilik perusahaan) sering disebut *agency problem*. Tidak jarang bahwa manajer perusahaan memiliki tujuan yang berbeda dan kepentingan yang bertentangan dengan tujuan utama perusahaan dan sering mengabaikan kepentingan pemegang saham. Minat yang berbeda antara manajer dan pemegang saham telah mengakibatkan konflik yang biasa disebut dengan konflik keagenan. Kondisi tersebut terjadi karena manajer lebih mengutamakan kepentingan pribadi, sebaliknya pemegang saham tidak menyukai kepentingan pribadi dari manajer karena apa yang dilakukan manajer tersebut akan menambah biaya bagi perusahaan dan hal ini dapat menyebabkan penurunan keuntungan perusahaan serta berpengaruh terhadap harga saham, dan pada akhirnya akan menurunkan nilai perusahaan Wien Ika Permanasari (2010:1).

Pihak investor mempunyai pandangan bahwa industri transportasi masih dianggap sebagai sektor usaha *high risk* (risiko tinggi) dan *slow and low yielding* (hasil lambat dan rendah). Selain itu tingkat keamanan dan keselamatan transportasi nasional belum memenuhi persyaratan atau standar internasional. Kondisi infrastruktur perhubungan Indonesia dewasa ini pada setiap sektor jasa transportasi tidak memadai untuk kelancaran arus transportasi penumpang dan barang, seperti sering terjadinya berbagai kecelakaan penerbangan baik pesawat jatuh maupun pesawat tergelincir di Bandara ketika hendak melakukan *landing*, pembajakan di laut, maupun kecelakaan di transportasi darat.

Faktor yang menunjang seperti ketersediaan sarana dan prasarana yang mencukupi dan efektif, serta tumbuhnya industri jasa yang efisien dan berdaya saing tinggi pada setiap sektor perhubungan baik darat, laut maupun udara, akan menentukan kecepatan pertumbuhan perekonomian Indonesia dalam mengatasi persaingan global yang makin ketat dan berat. Investor menilai menanamkan modal di perusahaan transportasi dapat beresiko tinggi (*high risk*). Selain itu, ganti kerugian dari kecelakaan dapat mempengaruhi turunnya pendapatan perusahaan. Kondisi ini berdampak pada kesulitan keuangan pada perusahaan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Beberapa perusahaan transportasi terindikasi mengalami kesulitan keuangan dilihat dari laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan tersebut memperlihatkan laba beberapa perusahaan transportasi cenderung mengalami penurunan bahkan ada yang mengalami kerugian.

Jika kondisi laba perusahaan transportasi mengalami kerugian atau kesehatan perusahaan transportasi kurang baik. Tingkat kerugian atau kesehatan suatu perusahaan mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menjalankan usahanya, distribusi aktivitya, keefektifan penggunaan aktivitya, hasil usaha atau pendapatan yang telah dicapai, beban-beban tetap yang harus dibayar, serta potensi kebangkrutan yang akan dialami. Oleh karena itu, rasio keuangan bermanfaat dalam memprediksi kebangkrutan bisnis untuk periode satu sampai lima tahun sebelum bisnis tersebut benar-benar bangkrut.

Indeks harga saham yang terdapat di BEI salah satunya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), merupakan salah satu pedoman bagi investor dalam berinvestasi di pasar modal, khususnya saham. Indeks ini mencerminkan kondisi harga saham biasa dan harga saham preferen dari perusahaan tercatat di BEI. Naik turunnya IHSG sangat bergantung kepada pergerakan harga saham di bursa. Apabila pergerakan harga saham secara umum bagus dan naik, maka IHSG akan naik juga. Begitupun sebaliknya, bila pergerakan harga saham kurang bagus atau turun maka IHSG pun akan ikut turun. Tingginya volume perdagangan saham, mayoritas didominasi oleh sektor Property, *Real Estate & Building Construction*. Sementara sektor yang konsisten mengalami kenaikan volume perdagangan saham setiap tahunnya ditunjukkan oleh sektor Infrastruktur, Utilitas & Transportasi. Hal tersebut ditunjukkan dengan terjadinya peningkatan sejak 2013 hingga 2016, meskipun nilainya masih di bawah sektor property dan mengalami penurunan pada 2017. Saat ini transaksi atas saham-saham sektor infrastruktur, utilitas & transportasi masih kurang menarik perhatian, dan masih banyak perusahaan yang aktivitas perdagangan sahamnya tidur. Hanya beberapa saham perusahaan unggul di sektor infrastruktur, utilitas & transportasi yang memiliki tren bagus, seperti saham Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk : PGAS pada subsektor energi, saham Jasa Marga (Persero) Tbk : JSMR pada subsektor tol, bandara, pelabuhan dan sejenisnya, saham PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk : TLKM pada subsektor telekomunikasi dan saham PT. Solusi Tunas Pratama Tbk (TBIG) pada subsektor konstruksi non bangunan. (sumber: www.idx.co.id, 2019)

Perusahaan Transportasi yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia telah menerapkan prinsip *good corporate governance*. Penerapan prinsip *good corporate governance* secara konkret memiliki beberapa tujuan, antara lain memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing, mendapatkan *cost of capital* yang lebih murah, memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan, meningkatkan keyakinan dan kepercayaan *stakeholder* terhadap perusahaan, melindungi direksi dan komisaris

dari tuntutan hukum serta melindungi hak pemegang saham minoritas. Perusahaan yang menerapkan *good corporate governance* akan lebih efisien dan daya saingnya meningkat, yang pada gilirannya menjadikannya *sustainable company*.

Adapun yang berkepentingan terhadap terciptanya *good corporate governance* tidak hanya pemegang saham, tapi juga pemerintah, dan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap masalah ini. Menurut Riyanto (2014) bahwa bagi pemegang saham dan investor, *good governance* memberikan jaminan bahwa mereka akan memperoleh *returns* yang memadai atas dana yang ditanamkan ke perusahaan; bagi *authority bodies*, *good governance* akan meningkatkan efisiensi dan kredibilitas pasar modal sebagai salah satu alternatif investasi, yang pada gilirannya akan turut menentukan alokasi dana masyarakat ke kegiatan ekonomi (bisnis) yang produktif.

Bapepam dengan Surat Edaran No. SE-03/PM/2000 telah mensyaratkan agar penyelenggaraan *corporate governance* dapat berjalan dengan baik. Adapun ketentuan tersebut mengatur bahwa setiap perusahaan publik di Indonesia wajib membentuk komite audit dengan anggota minimal 3 orang yang diketuai oleh satu orang komisaris independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen terhadap perusahaan serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan (Wulandari, 2015). Dengan dibuatnya pedoman tersebut, maka diharapkan akan dapat mendorong terciptanya *good corporate governance* bagi perusahaan.

Kusumawati dan Riyanto (2016) mengemukakan bahwa *corporate governance* yang efektif dalam jangka panjang dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan menguntungkan pemegang saham. Selanjutnya, Lastanti (2015) menyatakan bahwa secara teoritis praktek *good corporate governance* dapat meningkatkan nilai perusahaan diantaranya meningkatkan kinerja keuangan, mengurangi resiko yang merugikan akibat tindakan pengelola yang cenderung menguntungkan diri sendiri dan umumnya *corporate governance* dapat meningkatkan kepercayaan investor. Adapun yang dimaksud dalam *good corporate governance* berupa

mekanismenya yang terdiri dari kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris, komite audit dan dewan direksi.

Konsentrasi kepemilikan institusional merupakan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Tarjo, 2012). Kepemilikan institusional bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan pada umumnya dan manajer sebagai pengelola perusahaan pada khususnya. Semakin besar kepemilikan institusional, maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan dan diharapkan juga dapat bertindak sebagai pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan oleh manajemen (Faisal, 2015). Menurut Tarjo (2012) bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap nilai pemegang saham. Hal ini berarti menunjukkan, bahwa kepemilikan institusional menjadi mekanisme yang handal sehingga mampu memotivasi manajer dalam meningkatkan kinerjanya yang pada akhirnya dapat meningkatkan nilai perusahaan. Begitu juga dengan penelitian Agus Santoso (2017), bahwa *Good Governance* yang diwakili oleh *proxy* kepemilikan institusional memiliki pengaruh langsung yang signifikan positif terhadap nilai perusahaan. Hal ini disebabkan pemegang saham institusional terfokus pada laba sekarang, jika laba sekarang dirasa menguntungkan maka investor tidak akan menarik investasinya.

Menurut Haruman (2016) kepemilikan manajemen adalah proporsi pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan. Dengan adanya kepemilikan manajemen dalam sebuah perusahaan, akan menimbulkan dugaan yang menarik bahwa nilai perusahaan meningkat sebagai akibat kepemilikan manajemen yang meningkat. Kepemilikan oleh manajemen yang besar akan efektif dalam memonitoring aktivitas perusahaan. Semakin besar kepemilikan saham oleh manajemen, maka berkurang kecenderungan manajemen untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya, sehingga mengakibatkan kenaikan nilai perusahaan dan ketika kepemilikan saham oleh manajemen rendah, maka ada kecenderungan terjadinya perilaku *opportunistic* manajer yang akan meningkat pula. Kepemilikan manajemen

terhadap saham perusahaan dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara pemegang saham luar dan manajemen, sehingga permasalahan keagenan diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer adalah juga sekaligus sebagai seorang pemilik. Manajer yang sekaligus pemegang saham akan meningkatkan nilai perusahaan, sehingga nilai kekayaannya sebagai pemegang saham akan meningkat juga. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Salafuddin (2016), menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan *consumer goods industry* artinya hal ini di duga manajer mampu mengelola asset perusahaan dengan baik ketika memiliki sebagian saham perusahaan.

Board independent atau dewan komisaris independen adalah jumlah dewan komisaris independen dalam perusahaan. Jumlah dewan komisaris independen yang semakin banyak menandakan bahwa dewan komisaris independen melakukan fungsi pengawasan dan koordinasi dalam perusahaan yang semakin baik (Wulandari, 2013). Dewan komisaris memegang peranan penting dalam perusahaan terutama dalam pelaksanaan GCG. Dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang ditugaskan untuk menjamin strategi perusahaan, mengawasi manajer dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Karena dewan komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi manajemen yang bertugas meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan, maka dewan komisaris merupakan pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan. Dewan komisaris juga harus memantau efektivitas praktik *good corporate governance* yang diterapkan perseroan, serta melakukan penyesuaian bilamana diperlukan. Tuntutan akan transparansi dan independensi terlihat dari adanya tuntutan agar perusahaan memiliki lebih banyak komisaris independen yang mengawasi tindakan-tindakan para eksekutif. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Alfinur (2016), menunjukkan bahwa komisaris Independen berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Adanya pengaruh positif tersebut disebabkan oleh mekanisme control yang kuat dari komisaris independen terhadap

manajemen, dimana mekanisme kontrol tersebut merupakan peran vital bagi terciptanya GCG.

Komite audit adalah sekelompok orang yang dipilih dari dewan komisaris perusahaan yang bertanggung jawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen. Dalam lampiran surat keputusan dewan direksi PT. Bursa Efek Jakarta No. Kep-315/BEJ/06-2000 poin 2f, peraturan tentang pembentukan komite audit disebutkan bahwa “Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris Perusahaan Tercatat yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris Perusahaan Tercatat untuk membantu dewan komisaris Perusahaan Tercatat melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan Perusahaan Tercatat.” Jika kualitas dan karakteristik komite audit dapat tercapai, maka transparansi pertanggungjawaban manajemen perusahaan dapat dipercaya, sehingga akan meningkatkan kepercayaan para pelaku pasar modal. Selain itu, tanggung jawab komite audit dalam melindungi kepentingan pemegang saham minoritas dapat meyakinkan investor untuk mempercayakan investasinya terhadap perusahaan tersebut. Siallagan dan Machfoedz (2013) menyatakan bahwa investor, analis dan regulator menganggap komite audit memberikan kontribusi dalam kualitas pelaporan keuangan. Hal ini membuktikan keberadaan komite audit secara positif dan signifikan mempengaruhi nilai perusahaan. Komite audit ini merupakan usaha perbaikan terhadap cara pengelolaan perusahaan terutama cara pengawasan terhadap manajemen perusahaan, karena akan menjadi penghubung antara manajemen perusahaan dengan dewan komisaris maupun pihak ekstern lainnya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Syafitri (2018) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan. Jumlah anggota komite audit dalam suatu perusahaan harus disesuaikan sesuai dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap selalu memperhatikan unsur efektivitas dalam proses pengambilan keputusan sehingga memberikan kontribusi dalam nilai perusahaan dan juga kualitas laporan keuangan.

S. Beiner, *et al* (2013) menegaskan bahwa dewan direktur merupakan institusi ekonomi yang membantu memecahkan permasalahan agensi yang melekat dalam perusahaan publik. Dewan direktur bertanggung jawab pada komisaris (*governance*) perusahaan mereka. Dewan direktur bertugas untuk menjalankan manajemen perusahaan. Cadbury menyarankan CEO terpisah dari anggota dewan komisaris. Menurut S. Beiner, *et al* (2013) jumlah dewan direktur biasanya berkaitan dengan implikasi dari kebijakan mengenai batasan jumlah dewan direktur. Sebaliknya, jika tidak terdapat kebijakan mengenai batasan jumlah dewan direktur, maka perusahaan akan memilih jumlah yang paling optimal. Dewan direktur merupakan mekanisme *governance* yang penting, karena dewan direksi dapat memastikan bahwa manajer mengikuti kepentingan dewan. Ketentuan jumlah minimal yang disyaratkan dalam peraturan UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (PT) yang harus dilaksanakan yaitu minimal untuk dewan direksi adalah 2 orang. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Syafitri (2018) menunjukkan bahwa *Tobin's Q* dapat dipengaruhi secara positif signifikan oleh Dewan Direksi, dengan meningkatkan jumlah Dewan Direksi maka *Tobin's Q* mengalami peningkatan secara signifikan.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Analisis Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Transportasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap nilai Perusahaan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)?
2. Apakah pertanggungjawaban berpengaruh terhadap nilai Perusahaan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)?

3. Apakah keterbukaan berpengaruh terhadap nilai Perusahaan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)?
4. Apakah kewajaran berpengaruh terhadap nilai Perusahaan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)?
5. Apakah kemandirian berpengaruh terhadap nilai Perusahaan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap nilai Perusahaan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Untuk menganalisis pengaruh pertanggungjawaban terhadap nilai Perusahaan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
3. Untuk menganalisis pengaruh keterbukaan terhadap nilai Perusahaan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
4. Untuk menganalisis pengaruh kewajaran terhadap nilai Perusahaan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
5. Untuk menganalisis pengaruh kemandirian terhadap nilai Perusahaan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil dan temuan penelitian diharapkan memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan penulis dapat lebih menyadari dan memahami tentang implementasi dari pelayanan di dalam sebuah perusahaan serta dapat mengaplikasikan secara langsung teori-teori yang didapat semasa perkuliahan dalam dunia usaha secara nyata, khususnya mengenai pengaruh *good corporate governance* terhadap nilai perusahaan.

2. Bagi Pengembangan Ilmu Manajemen

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pembandingan antara ilmu-ilmu manajemen (secara teori) dengan keadaan yang terjadi langsung di lapangan (praktek), khususnya mengenai pengaruh *good corporate governance* terhadap nilai perusahaan, sehingga dengan adanya perbandingan tersebut akan dapat lebih memajukan ilmu manajemen yang sudah ada untuk diterapkan pada dunia usaha secara nyata serta dapat menguntungkan semua pihak.

3. Bagi Peneliti Lain

Semoga hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi yang berguna bagi rekan-rekan yang sedang membahas masalah yang sama yaitu mengenai pengaruh *good corporate governance* terhadap nilai perusahaan, sehingga penulis berharap agar penelitian selanjutnya dapat lebih baik dari yang sekarang.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, pembahasan dan penyajian hasil penelitian akan disusun dengan materi sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II. Landasan Teori

Berisikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan manajemen keuangan seperti teori keagenan, *good corporate governance*, nilai perusahaan, penelitian terdahulu, dan hipotesis.

Bab III. Metode Penelitian

Berisikan tentang jenis dari penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian, uji persyaratan analisis data, metode analisis data dan pengujian hipotesis.

Bab IV. Hasil Dan Pembahasan

Bab ini penulis menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh *good corporate governance* terhadap nilai perusahaan.

Bab V. Simpulan Dan Saran

Bab ini berisikan simpulan dan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak yang bersangkutan dan bagi pembaca pada umumnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Keagenan

Menurut Suranta dan Midiastuty (2013) mendefinisikan keagenan merupakan sebuah kontrak di mana satu atau lebih (*principal*) menyewa orang lain (*agent*) untuk melakukan beberapa jasa untuk kepentingan mereka dengan mendelegasikan beberapa wewenang pembuatan keputusan kepada *agent*. Pihak perusahaan merupakan mekanisme yang memberikan kesempatan kepada berbagai partisipan untuk berkontribusi dalam modal (*principal*), keahlian dan tenaga kerja (*agent*) dalam rangka memaksimalkan keuntungan dalam jangka panjang.

Teori keagenan dapat menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan akan berperilaku, karena pada dasarnya antara *agent* dan *principal* memiliki kepentingan yang berbeda yang menyebabkan terjadinya konflik keagenan (*agent conflict*). Pada dasarnya, konflik keagenan terjadi karena adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan.

Adanya konflik kepentingan antara investor dan manajer menyebabkan munculnya *agency cost* yaitu biaya monitoring (*monitoring cost*) yang dikeluarkan oleh *principal* seperti auditing, penganggaran, sistem pengendalian dan kompensasi, biaya perikatan (*bonding expenditure*) yang dikeluarkan oleh *agent* dan kerugian residual berkaitan dengan *divergensi* kepentingan antara *principal* dan *agent*.

Teori keagenan mengasumsikan bahwa setiap individu hanya terdorong oleh kepentingan dirinya sendiri akibatnya akan menimbulkan konflik kepentingan antara agen dan principal. (Brigham dan Gapenski, 1996) teori keagenan menyatakan bahwa dalam pengelolaan perusahaan selalu ada konflik kepentingan antara :

a. Principal dan Agen.

Teori keagenan menekankan bahwa timbulnya konflik antara principal dan agen karena adanya pemisahan peran dan tanggung jawab atau yang disebut dengan *Agency Problem*. Konflik tersebut timbul karena manajer lebih mengutamakan kepentingan diri mereka sendiri dari pada kepentingan principal. Perbedaan tujuan dan kepentingan bahkan bukan hanya melibatkan antara manajemen dengan pemegang saham saja namun juga merambat kepihak-pihak lain. Dalam penelitian ini menggunakan teori agency pada konflik antara principal dan agen.

b. Manajer dan bawahannya.

(Brigham dan Gapenski, 1996) *konflik agency* muncul antara manajer dan bawahan di perusahaan yang diwakili oleh manajemen perusahaan. Adapun konflik yang terjadi antara manajer dan bawahan seperti dibawah ini :

- 1) Mengangkat bawahan dengan nepotisme
- 2) Tidak memberhentikan bawahan yang tidak memiliki kemampuan yang memadai
- 3) Memalsukan laporan.
- 4) Boros dalam pengeluaran yang tidak berdampak banyak terhadap kemajuan perusahaan. Bahkan agen bisa menambah fasilitas dan gaji mereka sendiri.

c. Pemilik perusahaan dan kreditor.

Menurut Michael C. Jensen dan William H. Meckling (1976), *Agency problem* juga muncul antara kreditor dengan perusahaan yang diwakili oleh manajemen perusahaan. Konflik akan muncul jika :

- 1) Manajemen mengambil alih proyek-proyek yang risikonya lebih besar dari yang diperkirakan oleh kreditor.
- 2) Perusahaan meningkatkan jumlah hutang hingga mencapai tingkatan yang lebih tinggi daripada yang diperkirakan oleh kreditor.

Menurut Siti Muyassaroh (2014), adanya masalah keagenan memunculkan biaya agensi yang terdiri dari:

1. Biaya pengawasan yang dikeluarkan oleh *principal* untuk mengawasi perilaku dari *agent* dalam mengelola perusahaan.
2. Biaya yang dikeluarkan oleh *agent* untuk menjamin bahwa *agent* tidak bertindak yang merugikan *principal*.
3. Penurunan tingkat utilitas *principal* maupun *agent* karena adanya hubungan agensi.

Konflik kepentingan terjadi tidak hanya antara investor dan manajer, tetapi juga antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. *Controlling shareholders* biasanya mengendalikan keputusan manajemen dan cenderung mengabaikan kepentingan *minority shareholders*.

Berkaitan dengan keagenan, maka perusahaan dipandang sebagai sekumpulan kontrak antara manajer perusahaan dan pemegang saham. Pemilik perusahaan menyerahkan pengelolaan perusahaan terhadap pihak manajemen. Manajer sebagai pihak yang diberi wewenang atas kegiatan perusahaan dan berkewajiban menyediakan laporan keuangan, akan cenderung untuk melaporkan sesuatu yang memaksimalkan utilitasnya dan mengorbankan kepentingan pemegang saham.

Manajer sebagai pengelola perusahaan, akan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan dibandingkan pemilik (pemegang saham). Manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik sebagai wujud dari tanggung jawab atas pengelolaan perusahaan, namun informasi yang disampaikan terkadang diterima tidak sesuai dengan kondisi perusahaan sebenarnya, sehingga hal ini memacu terjadinya konflik keagenan.

Darmawati dkk, (2016) mengemukakan bahwa investor sebagai pemilik, mempercayakan pengelolaan perusahaan kepada manajemen. Mereka tidak memiliki jaminan bahwa modal yang ditanamkan pasti disalurkan untuk investasi atau proyek yang menguntungkan. Manajer memiliki hak untuk mengelola perusahaan dan dengan demikian, manajer memiliki hak *diskresioner* dalam mengelola dana investor. Selanjutnya manajer kemungkinan dapat melakukan *ekspropriasi* dana investor.

2.2 Nilai Perusahaan

2.2.1 Pengertian Nilai Perusahaan

Menurut Permanasari (2010) bahwa nilai perusahaan pada dasarnya diukur dari beberapa aspek salah satunya adalah harga pasar saham perusahaan, karena harga pasar saham perusahaan mencerminkan penilaian investor atas keseluruhan ekuitas yang dimiliki. Selanjutnya, nilai perusahaan menurut Rika dan Ishlahuddin (2015) diartikan sebagai nilai pasar. Hal ini dikarenakan nilai perusahaan dapat memberikan keuntungan bagi pemegang saham secara maksimum jika harga saham perusahaan meningkat. Berarti semakin tinggi harga saham, maka makin tinggi keuntungan pemegang saham sehingga keadaan ini akan diminati oleh investor karena dengan permintaan saham yang meningkatkan menyebabkan nilai perusahaan juga akan meningkat. Nilai perusahaan dapat dicapai dengan maksimum jika para pemegang saham menyerahkan urusan pengelolaan perusahaan kepada orang-orang yang berkompeten dalam bidangnya, seperti manajer maupun komisaris.

Nilai perusahaan merupakan harga yang tersedia dibayar oleh calon pembeli andai perusahaan tersebut dijual, dalam jangka panjang tujuan perusahaan adalah memaksimalkan nilai perusahaan. Semakin tinggi nilai perusahaan menggambarkan semakin sejahtera pula pemiliknya. Nilai perusahaan akan tercermin dari harga pasar sahamnya Para akademisi dan analis di bidang keuangan mengembangkan berbagai konsep nilai sebagai upaya memahami tingkah laku harga saham. Berikut beberapa diantaranya adalah :

a. Nilai Ekonomi

Konsep ini berkaitan dengan kemampuan dasar suatu aktiva untuk memberikan aliran arus kas sesudah pajak kepada yang memilikinya. Nilai ekonomi pada dasarnya merupakan konsep pertukaran, nilai suatu barang didefinisikan sebagai jumlah kas yang ingin diserahkan pembeli saat ini yaitu nilai sekarangnya untuk dipertukarkan dengan suatu pola arus kas masa depan yang diharapkan. Nilai ekonomi mendasari beberapa konsep umum nilai

lainnya karena nilai ekonomi didasarkan pada logika pertukaran yang sangat alami dalam proses penginvestasian dana.

b. Nilai Pasar

Nilai pasar sering disebut kurs, adalah harga yang terjadi dari proses tawar-menawar di pasar. Juga dikenal sebagai nilai pasar wajar, yaitu setiap aktiva atau kumpulan aktiva, pada saat diperdagangkan dalam pasar yang terorganisasi atau diantara pihak-pihak swasta dalam suatu transaksi tanpa beban dan tanpa paksaan.

c. Nilai Intrinsik

Merupakan konsep yang paling abstrak, karena mengacu pada perkiraan nilai riil suatu saham sebagai wakil dari nilai perusahaan. Makna nilai perusahaan dalam konsep nilai intrinsik ini bukan sekedar harga dari sekumpulan asset, melainkan nilai perusahaan sebagai entitas bisnis yang memiliki kemampuan menghasilkan keuntungan di kemudian hari.

d. Nilai Likuidasi

Nilai likuiditas berkaitan dengan kondisi khusus mana kala suatu perusahaan harus melikuidasikan sebagian atau seluruh aktiva serta tagihan-tagihannya, namun demikian nilai likuidasi hanya dapat dipakai untuk kegunaan yang terbatas. Akan tetapi, nilai likuidasi juga dapat dipergunakan dalam menilai aktiva dari perusahaan yang belum diketahui untuk melaksanakan analisis perbandingan dalam penilaian kredit. Nilai likuidasi bisa dihitung dengan cara yang sama dengan menghitung nilai buku, yaitu dari neraca performa yang disiapkan ketika suatu perusahaan menjelang proses likuidasi.

e. Nilai Nominal

Nilai nominal lebih dikenal oleh banyak orang. Hal ini mungkin karena besaran itu tercantum secara formal dalam anggaran dasar perusahaan, disebutkan secara eksplisit dalam neraca perusahaan dan juga ditulis jelas dalam surat saham kolektif. Nilai nominal memiliki beberapa fungsi yuridis seperti menunjukkan jumlah nominal yang harus disetor pemegang saham dan juga memperlihatkan besarnya porsi kepemilikan pemegang saham terhadap perusahaan.

f. Nilai Pemecahan

Nilai pemecahan pada dasarnya berkaitan dengan pengambilalihan (*take over*) dan restrukturisasi aktivitas perusahaan. Kombinasi nilai ekonomi dari masing-masing segmen multi usaha melebihi nilai perusahaan secara keseluruhan, karena manajemen masa lalu yang tidak cakap ataupun kesempatan-kesempatan saat ini yang tidak diketahui lebih awal, perusahaan dipecah menjadi komponen-komponen yang dapat dijual untuk dilepaskan kepada pembeli lain.

g. Nilai Reproduksi

Ini merupakan jumlah yang diperlukan untuk menggantikan aktiva tetap yang sejenis. Nilai reproduksi pada kenyataannya adalah salah satu dari beberapa tolak ukur yang digunakan dalam mempertimbangkan nilai perusahaan yang masih berjalan. Penetapan nilai reproduksi adalah suatu estimasi yang sebagian besar didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan teknik.

h. Nilai berkelanjutan

Ini merupakan penerapan dari nilai ekonomi karena perusahaan yang masih berjalan diharapkan menghasilkan rangkaian arus kas dimana pembeli harus menilai untuk memperkirakan harga dari perusahaan tersebut secara keseluruhan.

2.2.2 Indikator Nilai Perusahaan

Pamungkas (2012) mengemukakan bahwa nilai perusahaan pada dasarnya diukur dari beberapa aspek salah satunya adalah harga pasar saham perusahaan karena dapat mencerminkan penilaian investor atas keseluruhan ekuitas yang dimiliki perusahaan tersebut. Nilai perusahaan tinggi akan membuat pasar percaya tidak hanya pada kinerja perusahaan saat ini namun juga pada prospek perusahaan di masa depan. Berikut ini adalah beberapa cara yang digunakan untuk mengukur nilai perusahaan, antara lain dengan menggunakan:

a. *Price Book Value* (PBV)

Menurut Dani (2015) bahwa *Price Book Value* (PBV) adalah perbandingan antara harga saham dan nilai buku (*book value*) yang diberikan pasar

keuangan untuk mengukur nilai perusahaan. Nilai *Price Book Value* (PBV) yang tinggi akan membuat pasar percaya pada kinerja dan prospek perusahaan. Menurut teori ini, jika harga saham lebih tinggi dari nilai buku perusahaan, nilai *Price Book Value* (PBV) akan meningkat sehingga perusahaan semakin bernilai tinggi di pasar keuangan. *Price Book Value* merupakan rasio yang dapat digunakan untuk mengukur nilai perusahaan. PBV menunjukkan kemampuan perusahaan menciptakan nilai perusahaan dalam bentuk harga terhadap modal yang tersedia. Dengan semakin tinggi PBV berarti perusahaan dapat dikatakan berhasil menciptakan nilai dan kemakmuran pemilik. Semakin baik kinerja keuangan suatu perusahaan semakin baik nilai perusahaan. Keputusan-keputusan keuangan yang diambil manajer keuangan dimaksud untuk meningkatkan kemakmuran pemilik perusahaan, hal ini ditunjukkan oleh meningkatnya nilai perusahaan (Husnan 2012). Rumus *Price Book Value* (PBV) Menurut Dani (2015):

$$PBV = \frac{\text{Harga Pasar per Saham}}{\text{Nilai Buku per Saham}} \times 100\%$$

b. *Price Earning Ratio* (PER)

Price Earning Ratio merupakan rasio harga pasar per saham terhadap laba bersih per saham. *Price Earning Ratio* merupakan rasio yang sering digunakan untuk mengevaluasi investasi prospektif. *Price Earning Ratio* dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Price\ Earning\ Ratio = \frac{\text{Harga Saham}}{\text{Laba per Saham}}$$

c. *Book Value Per Share* (BVS)

Book Value Per Share merupakan rasio perbandingan ekuitas pemegang saham dengan jumlah saham yang beredar. *Book Value Per Share* dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Book\ Value\ Per\ Share\ (BVS) = \frac{\text{Total Ekuitas}}{\text{Jumlah Saham yang Beredar}}$$

d. *Market Value of Equity* (MVE)

Market Value of Equity yaitu nilai pasar ekuitas perusahaan menurut penilaian para pelaku pasar. Nilai pasar ekuitas adalah jumlah ekuitas (saham beredar) dikali dengan harga per saham. Maka dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Market Value of Equity} = \frac{\text{Harga Pasar Saham}}{\text{Nilai Buku}}$$

e. *Market to Book Ratio* (MBR)

Market to Book Ratio merupakan rasio perbandingan harga saham di pasar dengan nilai buku saham yang digambarkan di neraca (Harahap dalam Riauwaty, 2014). *Market to Book Ratio* dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Market to Book Ratio} = \frac{\text{Harga Pasar Saham}}{\text{Nilai Buku}}$$

f. *Earning Per Share* (EPS)

Earning Per Share menunjukkan besarnya laba bersih perusahaan yang siap dibagikan untuk semua pemegang saham perusahaan. *Earning Per Share* dihitung dengan rumus:

$$\text{Earning Per Share} = \frac{\text{Laba Bersih setelah Pajak}}{\text{Jumlah Saham Biasa yang Beredar}}$$

g. *Tobin's Q*

Tobin's Q adalah indikator untuk mengukur kinerja perusahaan, khususnya tentang nilai perusahaan, yang menunjukkan suatu performa manajemen dalam mengelola aktiva perusahaan. *Tobin's Q* juga dapat digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan dari sisi potensi nilai pasar suatu perusahaan (Sudiyatno dan Puspitasari, 2010). *Tobin's Q* dihitung dengan rumus:

$$Q = \frac{MVS + D}{TA}$$

Penelitian ini mencoba meneliti nilai perusahaan dengan pendekatan menggunakan rumus *Price Book Value*. *Price Book Value* merupakan rasio yang dapat digunakan untuk mengukur nilai perusahaan. PBV menunjukkan kemampuan perusahaan menciptakan nilai perusahaan dalam bentuk harga terhadap modal yang tersedia.

2.3 *Good Corporate Governance (GCG)*

2.3.1 *Pengertian Good Corporate Governance (GCG)*

Menurut Kaihatu (2015) *good corporate governance (GCG)* merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini. Pertama, pentingnya hak para pemegang saham untuk memperoleh informasi yang benar dan tepat pada waktunya. Kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan dan *takeholder*. Pada dasarnya, penerapan *corporate governance* bertujuan untuk mengoptimalkan tingkat profitabilitas dan nilai perusahaan dalam jangka panjang tanpa mengabaikan kepentingan *stakeholder* lainnya.

Secara umum, terdapat 5 (lima) prinsip dasar dalam proses penerapan *good corporate governance*, antara lain:

1. Akuntabilitas (*accountability*)

Prinsip akuntabilitas memuat kewenangan yang harus dimiliki oleh dewan komisaris dan dewan direksi, beserta kewajibannya kepada pemegang saham dan *stakeholders* lainnya. Dewan direksi, bertanggung jawab atas keberhasilan pengelolaan perusahaan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pemegang saham. Dewan komisaris, bertanggung jawab atas keberhasilan pengawasan dan wajib memberikan nasehat kepada direksi atas pengelolaan perusahaan, sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai.

2. Pertanggungjawaban (*responsibility*)

Prinsip pertanggungjawaban menuntut perusahaan maupun pimpinan dan manajer perusahaan melakukan kegiatannya secara bertanggung jawab.

3. Keterbukaan (*transparency*)

Adanya prinsip keterbukaan, maka informasi harus diungkapkan secara tepat waktu dan akurat. Informasi yang diharapkan antara lain keadaan keuangan, kinerja keuangan, kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Prinsip

keterbukaan dalam GCG ini dilakukan agar pemegang saham dan orang lain mengetahui keadaan perusahaan, sehingga nilai pemegang saham dapat ditingkatkan.

4. Kewajaran (*fairness*)

Prinsip kewajaran mengandung arti bahwa seluruh pemangku kepentingan harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan perlakuan yang adil dari perusahaan. Setiap anggota direksi harus melakukan keterbukaan jika menemukan transaksi-transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

5. Kemandirian (*independency*)

Prinsip kemandirian dalam GCG menuntut para pengelola perusahaan agar dapat bertindak secara mandiri, sesuai peran dan fungsi yang dimilikinya tanpa ada tekanan-tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan sistem operasional perusahaan yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa prinsip-prinsip *good corporate governance* memegang peranan penting, antara lain pemenuhan informasi penting yang berkaitan dengan kinerja perusahaan sebagai bahan pertimbangan bagi para pemegang saham atau calon investor untuk menanamkan modalnya, perlindungan terhadap kedudukan pemegang saham dari penyalahgunaan wewenang dan penipuan yang dapat dilakukan oleh direksi atau komisaris perusahaan, juga sebagai perwujudan tanggung jawab perusahaan untuk mematuhi dan menjalankan setiap aturan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan di negara asalnya atau tempatnya berdomisili secara konsisten, termasuk peraturan di bidang lingkungan hidup, persaingan usaha, ketenagakerjaan, perpajakan, perlindungan konsumen dan sebagainya.

2.3.2 Manfaat *Good Corporate Governance* (GCG)

Manfaat dari penerapan *good corporate governance* dalam suatu perusahaan menurut Priambodo dan Suprayitno (2013) antara lain:

- a. Melindungi hak dan kepentingan dari para pemegang saham.

- b. Mengurangi biaya yang timbul karena penyalahgunaan wewenang, ataupun berupa biaya pengawasan yang timbul untuk mencegah terjadinya suatu masalah.
- c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dewan pengurus atau manajemen puncak dan manajemen perusahaan, sekaligus meningkatkan mutu hubungan manajemen puncak dengan manajemen senior perusahaan.
- d. Meningkatkan nilai saham perusahaan, sehingga dapat meningkatkan citra perusahaan dimata publik dalam jangka waktu yang lama.

Manfaat yang optimal dari *good corporate governance* ini tidak sama dari suatu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan faktor-faktor intern perusahaan, termasuk riwayat hidup perusahaan, jenis usaha, jenis risiko, struktur permodalan dan manajemennya.

2.3.3 Mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG)

Menurut Kaihatu (2015) *good corporate governance* (GCG) merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang mampu menciptakan nilai tambah untuk semua *stakeholder* yang ada. Mekanisme *corporate governance* mengacu pada sekumpulan mekanisme yang mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh manajer ketika terjadi pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian. Dalam penulisan ini, mekanisme GCG diproksikan dengan 5 (lima) variabel antara lain kepemilikan institusional, kepemilikan manajemen, dewan komisaris independen, komite audit dan ukuran dewan direksi.

1. Kepemilikan Institusional

Tarjo (2012) mengemukakan bahwa kepemilikan institusional merupakan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain. Institusi merupakan sebuah lembaga yang memiliki kepentingan besar terhadap investasi yang dilakukan termasuk investasi saham, sehingga biasanya institusi menyerahkan tanggungjawab pada divisi tertentu untuk mengelola investasi perusahaan. Lastanti (2015) berpendapat bahwa institusi memantau

secara profesional perkembangan investasinya maka tingkat pengendalian terhadap tindakan manajemen sangat tinggi sehingga potensi keuangan dapat ditekan. Keberadaan institusi inilah yang mampu menjadi alat *monitoring* efektif bagi perusahaan.

Kepemilikan institusional memiliki peranan yang cukup penting terutama untuk meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme *monitoring* yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer.

Selain itu, kepemilikan institusional memiliki arti penting terutama untuk memonitor manajemen, karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen, sehingga manajemen akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan.

Kepemilikan institusional bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan pada umumnya dan manajer sebagai pengelola perusahaan pada khususnya. Semakin besar kepemilikan institusional, maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan dan diharapkan juga dapat bertindak sebagai pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan oleh manajemen (Faisal, 2015).

Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional, sehingga dapat menghalangi perilaku *opportunistic* manajer.

Kepemilikan institusional memiliki kelebihan antara lain:

- a. Memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi, sehingga dapat menguji keandalan informasi.
- b. Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan yang lebih ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan.

Aktivitas *monitoring* institusi mampu mengubah struktur pengelolaan perusahaan dan mampu meningkatkan kemakmuran pemegang saham. *Monitoring* yang dilakukan institusi mampu mensubstitusi biaya keagenan lain, sehingga biaya keagenan menurun dan nilai perusahaan meningkat.

Kepemilikan institusional, diukur dari persentase kepemilikan saham oleh institusi (Agoes, 2011), sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\sum \text{saham yang dimiliki institusi}}{\sum \text{saham yang beredar}} \times 100\%$$

2. Kepemilikan Manajemen

Haruman (2008) berpendapat bahwa masalah yang sering ditimbulkan dari struktur kepemilikan ini adalah konflik keagenan, dimana terdapat kepentingan antara manajemen perusahaan sebagai pengambil keputusan dan para pemegang saham sebagai pemilik dari perusahaan. Kepemilikan manajemen akan mendorong manajemen untuk meningkatkan nilai perusahaan.

Kepemilikan manajemen merupakan besarnya proporsi pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan seperti komisaris, direktur, dan lain-lain. Adanya kepemilikan manajemen dalam sebuah perusahaan, akan menimbulkan dugaan yang menarik bahwa meningkatnya nilai perusahaan dianggap sebagai akibat dari kepemilikan manajemen yang meningkat. Pada dasarnya, kepemilikan oleh manajemen yang besar akan efektif dalam memonitoring aktivitas perusahaan.

Adanya proporsi kepemilikan yang cukup tinggi, terlihat jika manajer ikut memiliki perusahaan, sehingga akan berusaha semaksimal mungkin melakukan berbagai tindakan dalam mengoptimalkan kemakmuran perusahaan. Hal tersebut mengandung arti, bahwa peningkatan proporsi saham yang dimiliki manajer dipercaya akan menurunkan kecenderungan manajer untuk melakukan tindakan yang berlebihan. Dengan demikian, kepentingan

manajer dan pemegang saham dapat disatukan dalam wadah perusahaan, hal ini berdampak positif meningkatkan nilai perusahaan.

Semakin besar proporsi kepemilikan saham manajemen pada perusahaan, maka manajemen cenderung berusaha lebih giat untuk kepentingan pemegang saham yang tidak lain adalah dirinya sendiri. Kepemilikan saham manajemen akan membantu penyatuan kepentingan manajer dan pemegang saham, sehingga manajer dapat merasakan secara langsung dalam kaitannya dengan manfaat dari keputusan yang diambil serta ikut pula menanggung besarnya kerugian sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah.

Siallagan dan Machfoedz (2013) mengemukakan bahwa semakin besar kepemilikan saham oleh manajemen, maka berkurang kecenderungan manajemen untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya, sehingga dapat menaikkan nilai perusahaan dan ketika kepemilikan saham oleh manajemen rendah, maka terjadi kecenderungan meningkatnya perilaku oportunitis dari manajer. Kepemilikan manajemen terhadap saham perusahaan dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara pemegang saham luar dan manajemen. Kepemilikan manajemen, diukur dari persentase kepemilikan saham oleh manajemen (Siallagan dan Machfoedz, 2013).

$$\text{Kepemilikan Manajemen} = \frac{\sum \text{saham yang dimiliki manajer}}{\sum \text{saham yang beredar}} \times 100\%$$

3. Dewan Komisaris Independen

Board independent atau dewan komisaris independen adalah jumlah dewan komisaris independen dalam perusahaan. Jumlah dewan komisaris independen yang semakin banyak menandakan bahwa dewan komisaris independen melakukan fungsi pengawasan dan koordinasi dalam perusahaan yang semakin baik.

Dewan komisaris memegang peranan penting dalam perusahaan terutama dalam pelaksanaan GCG. Dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang ditugaskan untuk menjamin strategi perusahaan, mengawasi

manajer dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Karena dewan komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi manajemen yang bertugas meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan, maka dewan komisaris merupakan pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan. Dewan komisaris juga harus memantau efektivitas praktik *good corporate governance* yang diterapkan perseroan, serta melakukan penyesuaian bilamana diperlukan. Tuntutan akan transparansi dan independensi terlihat dari adanya tuntutan agar perusahaan memiliki lebih banyak komisaris independen yang mengawasi tindakan-tindakan para eksekutif (Lastanti, 2015).

Wulandari (2015) menganggap komisaris yang independen sama dengan direktur non-eksekutif. Ada peran yang memediasi hubungan antara manajer, auditor dan pemegang saham. Lebih lanjut, Wulandari (2015) menyatakan bahwa *non-executive director* (komisaris independen) dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi kebijaksanaan direksi serta memberikan nasihat kepada direksi. Sedangkan komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan yang *good corporate governance*.

Kusumawati dan Riyanto (2016) berpendapat dengan adanya asumsi bahwa *cross directorships* dewan akan menguntungkan bagi perusahaan untuk dapat meningkatkan nilai perusahaan di mata investor. Hubungan antara jumlah anggota dewan dengan nilai perusahaan didukung oleh perspektif fungsi *service* dan kontrol yang dapat diberikan oleh dewan. Fungsi *service* menyatakan bahwa dewan (komisaris) dapat memberikan konsultasi dan nasehat kepada manajemen (dan direksi). Fungsi kontrol yang dilakukan oleh dewan (komisaris) diambil dari teori agensi. Dari perspektif teori agensi, dewan komisaris mewakili mekanisme internal utama untuk mengontrol perilaku *opportunistic* manajemen sehingga dapat membantu menyelaraskan kepentingan pemegang saham dan manajer. Hal tersebut didukung oleh

Lastanti (2015) yang membuktikan, bahwa dewan komisaris mempunyai pengaruh positif terhadap nilai perusahaan yang diproksikan dengan Tobin's Q.

Siallagan dan Machfoedz (2013) mengemukakan bahwa dewan komisaris bertanggung jawab dan mempunyai kewenangan untuk mengawasi kebijakan dan kegiatan yang dilakukan direksi dan manajemen atas pengelolaan sumber daya perusahaan agar dapat berjalan secara efektif, efisien dan ekonomis dalam rangka mencapai tujuan organisasi, serta memberikan nasihat bilamana diperlukan.

Dewan komisaris harus mampu melaksanakan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi. Struktur *governance* di Indonesia memisahkan antara dewan komisaris dengan dewan direksi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (PT), tugas dewan komisaris adalah: (1) mengawasi kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan, dan (2) memberikan nasihat kepada direksi. Menurut peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI), sedikitnya sepertiga dari anggota komisaris pada perusahaan publik yang terdaftar di BEI merupakan komisaris independen. Menurut peraturan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Jakarta mengenai komisaris independen, ditetapkan jumlah komisaris independen proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan Pemegang Saham Pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari jumlah seluruh anggota komisaris.

Dewan komisaris independen, diukur dari persentase komisaris independen terhadap jumlah keseluruhan anggota dewan komisaris (Lastanti, 2015), sebagai berikut:

$$\text{PDKI} = \frac{\sum \text{Komisaris Independen}}{\sum \text{anggota dewan komisaris}} \times 100\%$$

Keterangan:

PDKI = Proporsi Dewan Komisaris Independen

4. Komite Audit

Komite audit adalah sekelompok orang yang dipilih dari dewan komisaris perusahaan yang bertanggung jawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen. Dalam lampiran surat keputusan dewan direksi PT. Bursa Efek Jakarta No. Kep-315/BEJ/06-2000 poin 2f, peraturan tentang pembentukan komite audit disebutkan bahwa “Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris Perusahaan Tercatat yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris Perusahaan Tercatat untuk membantu dewan komisaris Perusahaan Tercatat melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan Perusahaan Tercatat.”

Siallagan dan Machfoedz (2013) menyatakan bahwa pihak investor, analis dan regulator menganggap jika komite audit mampu memberikan kontribusi dalam kualitas pelaporan keuangan perusahaan. Hal ini membuktikan keberadaan komite audit secara positif dan signifikan mempengaruhi nilai perusahaan. Keberadaan komite audit dalam perusahaan merupakan usaha perbaikan terhadap cara pengelolaan perusahaan terutama cara pengawasan terhadap manajemen perusahaan, karena akan menjadi penghubung antara manajemen perusahaan dengan dewan komisaris maupun pihak ekstern lainnya.

Komite audit juga berperan aktif dalam mengawasi proses pelaporan keuangan perusahaan yang mana hal ini bertujuan untuk mewujudkan laporan keuangan yang disusun melalui proses pemeriksaan dengan integritas dan obyektivitas. Dalam hal ini, komite audit akan berperan efektif untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan dan membantu dewan komisaris memperoleh kepercayaan dari pemegang saham untuk memenuhi kewajiban penyampaian informasi.

Berdasarkan Surat Edaran dari Direksi PT. Bursa Efek Jakarta No. SE-008/BEJ/12-2001 tanggal 7 Desember 2001 perihal keanggotaan komite audit, disebutkan bahwa:

- a. Jumlah anggota komite audit sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, termasuk ketua komite audit.
- b. Anggota komite audit yang berasal dari komisaris, hanya sebanyak 1 (satu) orang. Anggota komite audit yang berasal dari komisaris tersebut harus merupakan komisaris independen Perusahaan Tercatat yang sekaligus menjadi ketua komite audit.
- c. Anggota lainnya dari komite audit adalah berasal dari pihak eksternal yang independen. Pihak eksternal adalah pihak diluar Perusahaan Tercatat yang bukan merupakan komisaris, direksi dan karyawan Perusahaan Tercatat, sedangkan independen adalah pihak diluar Perusahaan Tercatat yang tidak memiliki hubungan usaha dan hubungan afiliasi dengan Perusahaan Tercatat, komisaris, direksi dan Pemegang Saham Utama Perusahaan tercatat dan mampu memberikan pendapat profesional secara bebas sesuai dengan etika profesionalnya, tidak memiliki kepentingan kepada siapapun.

Komite Audit = Jumlah Anggota Komite Audit Perusahaan

5. Ukuran Dewan Direksi

Siallagan dan Machfoedz (2013) bahwa ukuran dewan direksi adalah jumlah dewan direksi dalam perusahaan, semakin banyak dewan dalam perusahaan akan memberikan suatu bentuk pengawasan terhadap kinerja perusahaan yang semakin lebih baik, dengan kinerja perusahaan yang baik dan terkontrol, maka akan menghasilkan profitabilitas yang baik dan nantinya akan dapat meningkatkan harga saham perusahaan dan nilai perusahaan pun juga akan ikut meningkat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Isshaq, *et al* (2009), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan positif antara *board size* dengan nilai perusahaan.

S. Beiner, *et al* (2013) menegaskan bahwa dewan direktur merupakan institusi ekonomi yang membantu memecahkan permasalahan agensi yang melekat dalam perusahaan publik. Dewan direktur bertanggung jawab pada komisaris (*governance*) perusahaan mereka (Adrian Cadbury dalam *Cadbury Comittee*,

1992). Dewan direktur bertugas untuk menjalankan manajemen perusahaan. Cadbury menyarankan CEO terpisah dari anggota dewan komisaris.

Menurut Faisal (2015) bahwa peningkatan ukuran dan diversitas dari dewan direksi akan memberikan manfaat bagi perusahaan karena terciptanya *network* dengan pihak luar perusahaan dan menjamin ketersediaan sumberdaya. Jumlah dewan yang besar menguntungkan perusahaan dari sudut pandang *resource dependence* yaitu bahwa perusahaan akan tergantung dengan dewannya untuk dapat mengelola sumber dayanya secara lebih baik.

Menurut S. Beiner, et al (2013) jumlah dewan direktur biasanya berkaitan dengan implikasi dari kebijakan mengenai batasan jumlah dewan direktur. Sebaliknya, jika tidak terdapat kebijakan mengenai batasan jumlah dewan direktur, maka perusahaan akan memilih jumlah yang paling optimal.

Lebih lanjut S. Beiner, et al (2013) menegaskan bahwa dewan direktur merupakan mekanisme *governance* yang penting, karena dewan direksi dapat memastikan bahwa manajer mengikuti kepentingan dewan. Ketentuan jumlah minimal yang disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang harus dilaksanakan yaitu minimal untuk dewan direksi adalah 2 orang.

Besarnya ukuran dewan direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi perusahaan tersebut secara jangka pendek maupun jangka panjang. Di sisi lain, Direksi juga harus memastikan bahwa perusahaan telah sepenuhnya menjalankan seluruh ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur *corporate governance* di Indonesia sesuai dengan UU. No 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dimana Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah badan tertinggi yang terdiri atas pemegang saham yang memiliki hak memilih anggota dewan komisaris dan dewan direksi

(Wulandari, 2015). Dewan direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan dalam dua hal yaitu untuk kepentingan dan tujuan perusahaan, serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Ukuran Dewan Direksi = Jumlah Anggota Dewan Direksi

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu pada dasarnya dapat dijadikan sebagai pedoman pada penelitian yang akan peneliti lakukan. Adapun penelitian terdahulu dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Analisis	Kesimpulan
1.	Mindra (2014)	Pengaruh <i>Earning per Share</i> , Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Leverage terhadap Nilai Perusahaan	Regresi linier berganda	<i>Earning Per Share</i> , Ukuran perusahaan, profitabilitas, dan Leverage secara bersama-sama berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Secara parsial variabel profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan dan variabel <i>earning per share</i> dan leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan
2.	Mutmainah (2015)	Analisis <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Nilai Perusahaan	Regresi linier berganda	Variabel <i>Good Corporate Governance</i> secara signifikan terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
3.	Salafuddin (2016)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Terhadap Nilai Perusahaan <i>Consumer Goods Industry</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	Regresi linier berganda	Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris independen, komite audit secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan

4.	Alfinur (2016)	Pengaruh mekanisme <i>good corporate governance</i> terhadap nilai perusahaan pada perusahaan yang listing di BEI	Regresi linier berganda	Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Komisaris Independen berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
5.	Putri (2016)	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> terhadap Nilai Perusahaan dengan Ukuran Perusahaan dan Jumlah Dewan Komisaris sebagai Variabel Pemoderasi (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar Bursa Efek Indonesia)	<i>Moderated Regression Analysis</i>	Nilai perusahaan tidak dipengaruhi oleh <i>Corporate social responsibility</i> . Nilai perusahaan akan dipengaruhi oleh <i>corporate social responsibility</i> dengan dimoderasi oleh ukuran perusahaan dan jumlah dewan komisaris.
6.	Agus Santoso (2017)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Nilai Perusahaan Dengan kinerja keuangan sebagai variabel interverning	Regresi linier berganda	Hasil analisis yang sudah dilakukan menunjukkan hasil bahwa <i>Good Governance</i> yang diwakili oleh proxy kepemilikan instutisional memiliki pengaruh langsung yang signifikan positif terhadap nilai perusahaan
7.	Lutvia Wati (2017)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap nilai perusahaan dengan variabel intervening kinerja keuangan (Studi pada sektor industri barang konsumsi)	Regresi linier berganda	Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

2.5 Pengembangan Hipotesis

2.5.1 Pengaruh Akuntabilitas (Kepemilikan Manajemen) Terhadap Nilai Perusahaan

Prinsip akuntabilitas memuat kewenangan yang harus dimiliki oleh dewan komisaris dan dewan direksi, beserta kewajibannya kepada pemegang saham dan

stakeholders lainnya. Dewan direksi, bertanggung jawab atas keberhasilan pengelolaan perusahaan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pemegang saham. Dewan komisaris, bertanggung jawab atas keberhasilan pengawasan dan wajib memberikan nasehat kepada direksi atas pengelolaan perusahaan, sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Prinsip akuntabilitas dalam hal ini diprosikan oleh kepemilikan manajemen.

Menurut Haruman (2016) kepemilikan manajemen adalah proporsi pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan. Dengan adanya kepemilikan manajemen dalam sebuah perusahaan, akan menimbulkan dugaan yang menarik bahwa nilai perusahaan meningkat sebagai akibat kepemilikan manajemen yang meningkat. Kepemilikan oleh manajemen yang besar akan efektif dalam memonitoring aktivitas perusahaan. Semakin besar kepemilikan saham oleh manajemen, maka berkurang kecenderungan manajemen untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya, sehingga mengakibatkan kenaikan nilai perusahaan dan ketika kepemilikan saham oleh manajemen rendah, maka ada kecenderungan terjadinya perilaku *opportunistic* manajer yang akan meningkat pula.

Kepemilikan manajemen terhadap saham perusahaan dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara pemegang saham luar dan manajemen, sehingga permasalahan keagenan diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer adalah juga sekaligus sebagai seorang pemilik. Manajer yang sekaligus pemegang saham akan meningkatkan nilai perusahaan, sehingga nilai kekayaannya sebagai pemegang saham akan meningkat juga. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Salafuddin (2016), menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan *consumer goods industry* artinya hal ini di duga manajer mampu mengelola asset perusahaan dengan baik ketika memiliki sebagian saham perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diajukan hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

H₁ : Akuntabilitas (Kepemilikan Manajemen) berpengaruh terhadap nilai Perusahaan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

2.5.2 Pengaruh Pertanggungjawaban (*Corporate Social Responsibility*) Terhadap Nilai Perusahaan

Prinsip pertanggungjawaban menuntut perusahaan maupun pimpinan dan manajer perusahaan melakukan kegiatannya secara bertanggung jawab. Tanggung jawab perusahaan dalam hal ini merupakan tanggung jawab kepada sosial atau lebih dikenal dengan *corporate social responsibility*. Pengungkapan *corporate social responsibility* merupakan proses komunikasi dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Hal tersebut memperluas tanggung jawab organisasi (khususnya perusahaan) di luar peran tradisionalnya untuk menyediakan laporan keuangan kepada pemilik modal khususnya pemegang saham. Perluasan tersebut dibuat dengan asumsi bahwa perusahaan mempunyai tanggung jawab yang lebih luas dibanding hanya mencari laba untuk pemegang saham.

Penelitian yang dilakukan oleh Putri (2016) memperlihatkan bahwa Nilai perusahaan tidak dipengaruhi oleh *Corporate social responsibility*. Nilai perusahaan akan dipengaruhi oleh *corporate social responsibility* dengan dimoderasi oleh ukuran perusahaan dan jumlah dewan komisaris.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diajukan hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

H₂ : Pertanggungjawaban (*Corporate Social Responsibility*) berpengaruh terhadap nilai Perusahaan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

2.5.3 Pengaruh Keterbukaan (*Earning per Share*) Terhadap Nilai Perusahaan

Adanya prinsip keterbukaan, maka informasi harus diungkapkan secara tepat waktu dan akurat. Informasi yang diharapkan antara lain keadaan keuangan,

kinerja keuangan, kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Prinsip keterbukaan dalam GCG ini dilakukan agar pemegang saham dan orang lain mengetahui keadaan perusahaan, sehingga nilai pemegang saham dapat ditingkatkan. Prinsip keterbukaan dalam hal ini diwujudkan dalam bentuk *Earning Per Share* (EPS).

Earning per share atau laba per lembar saham adalah keuntungan bersih untuk tiap lembar sahamnya yang mampu diraih perusahaan pada saat menjalankan operasinya. *Earning per share* adalah rasio yang menunjukkan pendapatan yang diperoleh setiap lembar saham.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mindra (2014) diperoleh hasil *Earning Per Share*, Ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage secara bersama-sama berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Secara parsial variabel profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan dan variabel *earning per share* dan leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diajukan hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

H₃ : Keterbukaan (*Earning per Share*) berpengaruh terhadap nilai Perusahaan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

2.5.4 Pengaruh Kewajaran (Kepemilikan Institusional) Terhadap Nilai Perusahaan

Prinsip kewajaran mengandung arti bahwa seluruh pemangku kepentingan harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan perlakuan yang adil dari perusahaan. Setiap anggota direksi harus melakukan keterbukaan jika menemukan transaksi-transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Prinsip kewajaran dalam hal ini merupakan bentuk kepemilikan institusional.

Tarjo (2012) mengemukakan bahwa kepemilikan institusional merupakan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain. Kepemilikan institusional

bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan pada umumnya dan manajer sebagai pengelola perusahaan pada khususnya. Semakin besar kepemilikan institusional, maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan dan diharapkan juga dapat bertindak sebagai pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan oleh manajemen (Faisal, 2015).

Menurut Tarjo (2012) bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap nilai pemegang saham. Hal ini berarti menunjukkan, bahwa kepemilikan institusional menjadi mekanisme yang handal sehingga mampu memotivasi manajer dalam meningkatkan kinerjanya yang pada akhirnya dapat meningkatkan nilai perusahaan. Begitu juga dengan penelitian Agus Santoso (2017), bahwa *Good Governance* yang diwakili oleh *proxy* kepemilikan institusional memiliki pengaruh langsung yang signifikan positif terhadap nilai perusahaan. Hal ini disebabkan pemegang saham institusional terfokus pada laba sekarang, jika laba sekarang dirasa menguntungkan maka investor tidak akan menarik investasinya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diajukan hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

H₄ : Kewajaran (Kepemilikan Institusional) berpengaruh terhadap nilai Perusahaan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

2.5.5 Pengaruh Kemandirian (Dewan Komisaris Independen) Terhadap Nilai Perusahaan

Prinsip kemandirian dalam GCG menuntut para pengelola perusahaan agar dapat bertindak secara mandiri, sesuai peran dan fungsi yang dimilikinya tanpa ada tekanan-tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan sistem operasional perusahaan yang berlaku. Prinsip kemandirian dalam hal ini merupakan bentuk dari Dewan Komisaris Independen.

Board independent atau dewan komisaris independen adalah jumlah dewan komisaris independen dalam perusahaan. Jumlah dewan komisaris independen yang semakin banyak menandakan bahwa dewan komisaris independen melakukan fungsi pengawasan dan koordinasi dalam perusahaan yang semakin

baik (Wulandari, 2013). Dewan komisaris memegang peranan penting dalam perusahaan terutama dalam pelaksanaan GCG. Dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang ditugaskan untuk menjamin strategi perusahaan, mengawasi manajer dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Karena dewan komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi manajemen yang bertugas meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan, maka dewan komisaris merupakan pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan.

Dewan komisaris juga harus memantau efektivitas praktik *good corporate governance* yang diterapkan perseroan, serta melakukan penyesuaian bilamana diperlukan. Tuntutan akan transparansi dan independensi terlihat dari adanya tuntutan agar perusahaan memiliki lebih banyak komisaris independen yang mengawasi tindakan-tindakan para eksekutif. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Alfinur (2016), menunjukkan bahwa komisaris Independen berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Adanya pengaruh positif tersebut disebabkan oleh mekanisme control yang kuat dari komisaris independen terhadap manajemen, dimana mekanisme kontrol tersebut merupakan peran vital bagi terciptanya GCG.

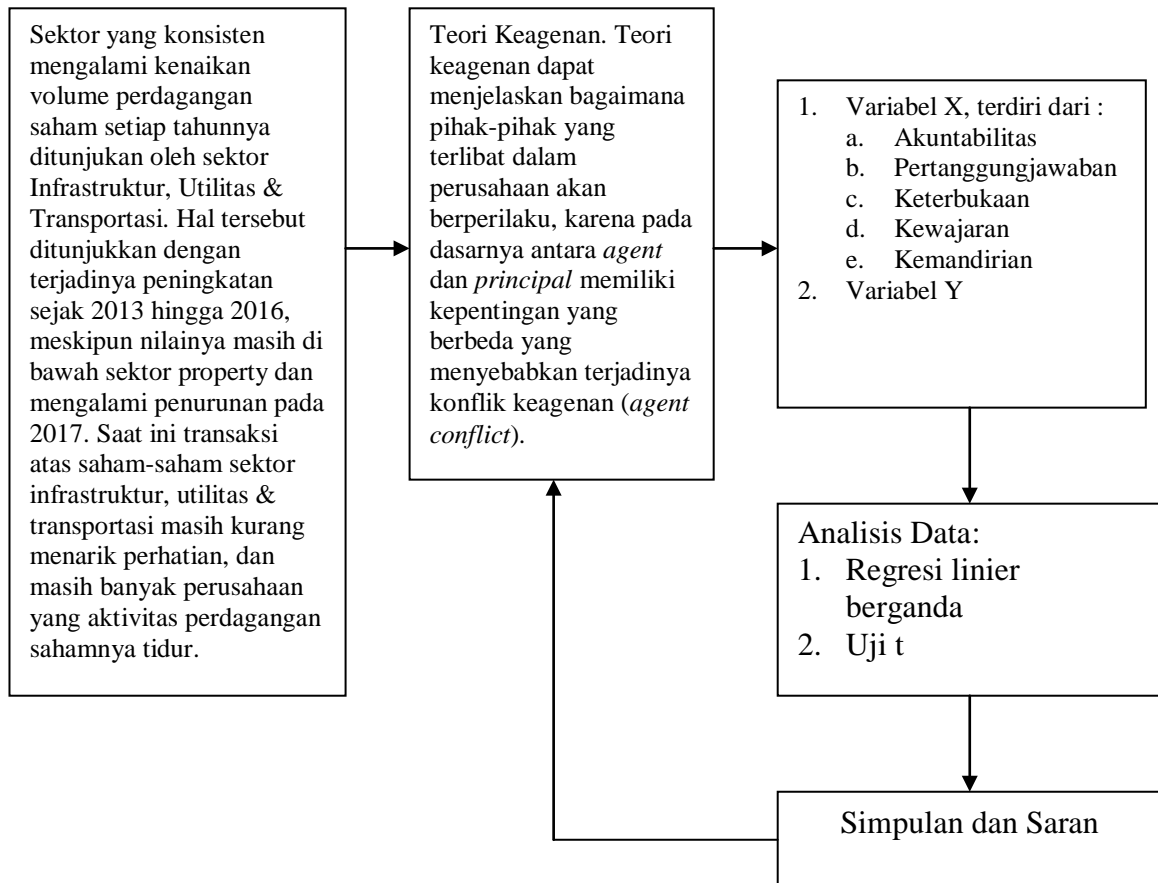
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diajukan hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

H₅ : Kemandirian (Dewan Komisaris Independen) berpengaruh terhadap nilai Perusahaan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

2.6 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2013) bahwa kerangka pemikiran yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen. Pertautan antar variabel tersebut, selanjutnya dirumuskan ke dalam bentuk paradigma penelitian. Oleh karena itu pada setiap penyusunan paradigma penelitian harus didasarkan pada kerangka berpikir.

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pemikiran



2.7 Hipotesis

Sugiyono (2013) mengemukakan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang didapat belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik. Berdasarkan uraian kerangka teori, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut :

H_1 : Akuntabilitas berpengaruh terhadap nilai Perusahaan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

- H₂ : Pertanggungjawaban berpengaruh terhadap nilai Perusahaan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
- H₃ : Keterbukaan berpengaruh terhadap nilai Perusahaan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
- H₄ : Kewajaran berpengaruh terhadap nilai Perusahaan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
- H₅ : Kemandirian berpengaruh terhadap nilai Perusahaan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2013) bahwa jenis penelitian pada dasarnya terdapat 2 (dua) jenis yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang tidak dapat dinominasikan dengan menggunakan angka, melainkan disajikan berupa keterangan, penjelasan, dan pembahasan teori, sedangkan penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran fenomena yang diamati dengan lebih mendetail, misalnya disertai data numerik, karakteristik dan pola hubungan antar variabel, hal tersebut sesuai dengan pendapat Sugiyono (2013). Berdasarkan pendapat tersebut, maka penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif. Desain penelitian ini adalah penelitian kausal. Penelitian kausal dilakukan untuk menelaah varians dalam variabel terikat agar dapat memprediksi hasil dan keluarannya (*output dan outcomes*) yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Nilai Perusahaan.

3.2 Sumber Data

Sutopo (2014) mengemukakan bahwa jenis data dikelompokkan berdasarkan jenis dan posisinya, mulai dari yang paling nyata sampai dengan yang paling samar-samar, dan mulai dari yang paling terlibat sampai dengan yang bersifat sekunder. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer yang digunakan adalah berasal dari hasil wawancara. Sumber data ditulis atau direkam (Sutopo, 2014). Wawancara dilakukan kepada informan yang telah ditentukan dengan menggunakan panduan wawancara mengenai permasalahan dalam penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber yang ada (Sutopo, 2014). Data sekunder digunakan sebagai pendukung guna mencari fakta yang sebenarnya. Data sekunder juga diperlukan untuk melengkapi informasi dalam rangka mencocokkan data yang diperoleh.

Berdasarkan sumbernya, data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari sumber tidak langsung (sumber kedua). Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari Bursa Efek Indonesia melalui www.idx.co.id, sehingga data yang dibutuhkan untuk mendukung penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang diukur dengan suatu alat ukur tertentu, yang diperlukan untuk keperluan analisis secara kuantitatif yang berbentuk angka-angka seperti akuntabilitas, pertanggungjawaban, keterbukaan, kewajaran, kemandirian dan nilai perusahaan.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan cara atau teknik dalam proses pengumpulan data penelitian yang terdiri dari:

a. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah studi yang dilakukan dengan membaca buku/literatur atau karya ilmiah lainnya dan sumber data lain yang mempunyai hubungan dengan penulisan penelitian ini. Data yang digunakan dalam studi pustaka ini adalah data sekunder, yaitu data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan pihak lain.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dipergunakan untuk mendapatkan data primer langsung dari objek penelitian. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data. Metode penelitian lapangan langsung yang digunakan untuk memperoleh data dalam penulisan penelitian ini secara rinci adalah sebagai berikut:

- 1) Observasi atau disebut juga dengan pengamatan meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap sesuatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indera.
- 2) Menyebarkan kuesioner atau pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi tertulis dari responden.

Berdasarkan uraian tersebut, maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui studi pustaka. Studi pustaka adalah studi yang dilakukan dengan membaca buku/literatur atau karya ilmiah lainnya dan sumber data lain yang mempunyai hubungan dengan penulisan penelitian ini. Data yang digunakan dalam studi pustaka ini adalah data sekunder, yaitu data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan pihak lain.

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Pengertian populasi menurut Sugiyono (2010) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Perusahaan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2017 sebanyak 33 perusahaan.

3.4.2 Sampel

Sugiyono (2010) mengemukakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dan menggunakan kriteria-kriteria tertentu yang telah ditentukan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1 Kriteria Pemilihan Sampel Penelitian

No.	Kriteria Pemilihan Sampel Penelitian	Jumlah Sampel
1.	Perusahaan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2017	33
2.	Perusahaan Transportasi yang tidak mempublikasikan laporan keuangan secara konsisten pada tahun 2013-2017	(15)
3.	Perusahaan Transportasi yang tidak memiliki kepemilikan insitutisional, kepemilikan manajemen, dewan komisaris independen, komite audit, dan ukuran dewan direksi pada tahun 2013-2017	(3)
4.	Perusahaan transportasi yang berbentuk perseroan	(1)
Total		14

Berdasarkan kriteria tersebut di atas, terdapat 8 (delapan) perusahaan transportasi yang terdaftar dan mempublikasi laporan keuangan secara konsisten selama periode 2013-2017, seperti tertera pada Tabel 3.2 di bawah ini.

Tabel 3.2 Sampel Perusahaan Transportasi dalam Penelitian

No	Kode	Nama Emiten
1.	ASSA	PT Adi Sarana Armada, Tbk
2.	BBRM	PT Pelayanan Nasional Bina Buana Raya, Tbk
3.	CASS	PT Cardig Aero Service, Tbk
4.	HITS	PT Humpus Internoda Transportasi, Tbk
5.	IATA	PT Indonesia Air Transport & Insfrastruktur, Tbk
6.	KARW	PT ICTSI Jasa Prima, Tbk
7.	LEAD	PT Logindo Samudera Makmur, Tbk
8.	MIRA	PT Mitra International Resources, Tbk
9.	SAFE	PT Steady Safe, Tbk
10.	SDMU	PT Sidomulyo Selaras, Tbk
11.	SMDR	PT Samudera Indonesia, Tbk
12.	SOCI	PT Soechi Lines, Tbk
13.	TMAS	PT Pelayaran Tempuran Emas, Tbk
14.	WINS	PT Wintermar Offshore Marine, Tbk

Sumber: BEI, 2019.

3.5 Variabel Penelitian

Variabel penelitian ini terdiri dari 2 macam variabel, yaitu variabel terikat atau variabel yang tergantung pada variabel lainnya dan variabel bebas atau variabel yang tidak tergantung pada variabel yang lainnya, variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas yang meliputi akuntabilitas, pertanggungjawaban, keterbukaan, kewajaran, dan kemandirian, sedangkan variabel terikat meliputi nilai perusahaan (PBV).

3.6 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel merupakan batasan terhadap variabel yang dijadikan pedoman dalam penelitian sehingga tujuan arahnya tidak menyimpang. Untuk mempermudah batasan penelitian penulis menyederhanakan pemikirannya dalam konsep sebagai berikut:

1. Akuntabilitas (Kepemilikan Manajemen (X_1))

Kepemilikan manajemen adalah proporsi pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan. Kepemilikan manajemen, diukur dari persentase kepemilikan saham oleh manajemen (Siallagan dan Machfoedz, 2013).

$$\text{Kepemilikan Manajemen} = \frac{\sum \text{saham yang dimiliki manajer}}{\sum \text{saham yang beredar}} \times 100\%$$

2. Pertanggungjawaban (*Corporate Social Responsibility* (X_2))

Pengukuran *corporate social responsibility* menggunakan variabel dummy yang apabila:

- 1) Score 0 bila tidak mengungkapkan dalam laporan keuangan
- 2) Score 1 bila mengungkapkan dalam laporan keuangan

$$\text{CSRI} = \frac{\sum X_{ij}}{N_j} \times 100\%$$

CSRI = *Corporate Social Responsibility Disclosure Index* Perusahaan

$\sum X_{ij}$ = Jumlah item untuk perusahaan j, $n_j < 78$

N_j = Dummy variabel, 1 = jika item diungkapkan dan 0 = jika item tidak diungkapkan

3. Keterbukaan (*Earning per Share* (X_3))

Earning Per Share menunjukkan besarnya laba bersih perusahaan yang siap dibagikan untuk semua pemegang saham perusahaan. *Earning Per Share* dihitung dengan rumus:

$$Earning Per Share = \frac{\text{Laba Bersih setelah Pajak}}{\text{Jumlah Saham Biasa yang Beredar}}$$

4. Kewajaran (Kepemilikan Insitustional (X_4))

Kepemilikan institusional merupakan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Tarjo, 2012). Kepemilikan institusional, diukur dari persentase kepemilikan saham oleh institusi (Agoes, 2011), sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\sum \text{saham yang dimiliki institusi}}{\sum \text{saham yang beredar}} \times 100\%$$

5. Kemandirian (Dewan Komisaris Independen (X_5))

Dewan komisaris independen adalah jumlah dewan komisaris independen dalam perusahaan. Dewan komisaris independen, diukur dari persentase komisaris independen terhadap jumlah keseluruhan anggota dewan komisaris (Lastanti, 2015), sebagai berikut:

$$\text{PDKI} = \frac{\sum \text{Komisaris Independen}}{\sum \text{anggota dewan komisaris}} \times 100\%$$

6. Nilai Perusahaan (Y)

Nilai perusahaan merupakan harga yang tersedia dibayar oleh calon pembeli andai perusahaan tersebut dijual. Formula untuk menghitung *price to book value* ditunjukkan dengan rumus sebagai berikut:

$$Price\ to\ book\ value = \frac{\text{harga saham}}{\text{nilai buku saham}}$$

Nilai buku saham dapat dihitung dari: $\frac{\text{total modal}}{\text{jumlah saham beredar}}$

3.7 Metode Analisis Data

3.7.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah penyajian data secara numerik. Statistik deskriptif menyajikan ukuran-ukuran numerik yang sangat penting bagi data sampel. Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan profil data sampel yang meliputi antara lain mean, maksimum, minimum dan standar deviasi.

3.7.2 Uji Asumsi Klasik

3.7.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2012). Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Uji normalitas data tersebut dapat dilakukan melalui 3 cara yaitu menggunakan Uji Kolmogorof-Smirnov (Uji K-S), grafik histogram dan kurva penyebaran P-Plot.

Untuk Uji K-S yakni jika nilai hasil Uji K-S > dibandingkan taraf signifikansi 0,05 maka sebaran data tidak menyimpang dari kurva normalnya itu uji normalitas. Sedangkan melalui pola penyebaran PPlot dan grafik histogram, yakni jika pola penyebaran memiliki garis normal maka dapat dikatakan data berdistribusi normal.

3.7.2.1.2 Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antarvariabel bebas (independen). Jika hasil penelitian menunjukkan nilai *Tolerance* > 1,0 dan *Variance Inflation Factor* (VIF) \geq 10 berarti ada multikolinearitas, sebaliknya jika nilai *Tolerance* < 1,0 dan VIF < 10 berarti tidak ada multikolonieritas.

3.7.2.1.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari *residual* pada suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance residual* suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homokedastisitas, dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi adanya Heteroskedastisitas. Kebanyakan data *crosssection* mengandung situasi Heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang dan besar). Menurut Suliyanto (2011) ada beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya Heteroskedastisitas yaitu melalui grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu *ZPRED* dengan risidunya *SRESID*. Deteksi ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara *SRESID* dan *ZPRED* dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual ($Y \text{ prediksi} - Y \text{ sesungguhnya}$) yang telah *distudentized*.

3.7.2.1.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Uji *Durbin-Watson* adalah salah satu alat uji untuk mengetahui apakah suatu model regresi terdapat autokorelasi. Nilai *Durbin-Watson* akan dibandingkan dengan nilai dalam tabel *Durbin-Watson* untuk mendapatkan batas bawah (DL) dan batas atas (DU) dengan tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$.

Tabel 3.3. Kriteria Autokorelasi

Hipotesis nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi	Tolak	$0 < d < dl$
Tidak ada autokorelasi positif	No decision	$dl \leq d \leq du$
Tidak ada autokorelasi negatif	Tolak	$4-dl < d < 4$
Tidak ada autokorelasi negatif	No decision	$4-du \leq d \leq 4-dl$
Tidak ada autokorelasi, positif, dan negatif	Tidak ditolak	$du < d < 4-du$

Sumber : Suliyanto, 2011

3.7.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Untuk menganalisis pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat digunakan rumus regresi linier berganda dengan rumus sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + et$$

Keterangan:

- Y = Nilai perusahaan
- a = Konstanta
- $b_{1..5}$ = Koefisien regresi
- X_1 = Akuntabilitas
- X_2 = Pertanggungjawaban
- X_3 = Keterbukaan
- X_4 = Kewajaran
- X_5 = Kemandirian
- et = Errot term

3.7.4 Uji t

Uji t digunakan untuk menguji tingkat signifikansi konstanta dari masing-masing variabel independen. Pengujian ini dilakukan dengan tingkat kepercayaan 95% dan tingkat kesalahan 5% dengan $df=(n-2)$. Dasar pengambilan keputusannya yaitu :

- a) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai signifikan $\leq 0,05$ maka H_a diterima.
- b) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau nilai signifikan $> 0,05$ maka H_0 diterima.

3.8 Hipotesis Statistik

1. Hipotesis Satu

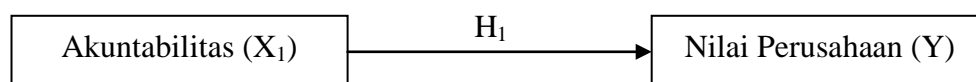
Prinsip akuntabilitas memuat kewenangan yang harus dimiliki oleh dewan komisaris dan dewan direksi, beserta kewajibannya kepada pemegang saham dan *stakeholders* lainnya. Dewan direksi, bertanggung jawab atas keberhasilan

pengelolaan perusahaan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pemegang saham. Dewan komisaris, bertanggung jawab atas keberhasilan pengawasan dan wajib memberikan nasehat kepada direksi atas pengelolaan perusahaan, sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Prinsip akuntabilitas dalam hal ini diprosikan oleh kepemilikan manajemen. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Salafuddin (2016), menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan *consumer goods industry* artinya hal ini di duga manajer mampu mengelola asset perusahaan dengan baik ketika memiliki sebagian saham perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diajukan hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

Ho₁ : Akuntabilitas (Kepemilikan Manajemen) tidak berpengaruh terhadap nilai Perusahaan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Ha₁ : Akuntabilitas (Kepemilikan Manajemen) berpengaruh terhadap nilai Perusahaan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).



2. Hipotesis Dua

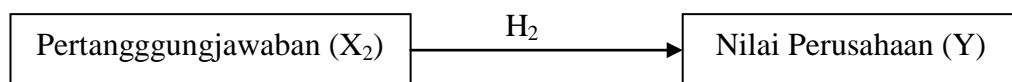
Prinsip pertanggungjawaban menuntut perusahaan maupun pimpinan dan manajer perusahaan melakukan kegiatannya secara bertanggung jawab. Tanggung jawab perusahaan dalam hal ini merupakan tanggung jawab kepada sosial atau lebih dikenal dengan *corporate social responsibility*. Pengungkapan *corporate social responsibility* merupakan proses komunikasi dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Hal tersebut memperluas tanggung jawab organisasi (khususnya perusahaan) di luar peran tradisionalnya untuk menyediakan laporan keuangan kepada pemilik modal khususnya pemegang saham. Perluasan tersebut dibuat

dengan asumsi bahwa perusahaan mempunyai tanggung jawab yang lebih luas dibanding hanya mencari laba untuk pemegang saham. Penelitian yang dilakukan oleh Putri (2016) memperlihatkan bahwa Nilai perusahaan tidak dipengaruhi oleh *Corporate social responsibility*. Nilai perusahaan akan dipengaruhi oleh *corporate social responsibility* dengan dimoderasi oleh ukuran perusahaan dan jumlah dewan komisaris.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diajukan hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

Ho₂ : Pertanggungjawaban (*Corporate Social Responsibility*) tidak berpengaruh terhadap nilai Perusahaan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Ha₂ : Pertanggungjawaban (*Corporate Social Responsibility*) berpengaruh terhadap nilai Perusahaan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).



3. Hipotesis Tiga

Adanya prinsip keterbukaan, maka informasi harus diungkapkan secara tepat waktu dan akurat. Informasi yang diharapkan antara lain keadaan keuangan, kinerja keuangan, kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Prinsip keterbukaan dalam GCG ini dilakukan agar pemegang saham dan orang lain mengetahui keadaan perusahaan, sehingga nilai pemegang saham dapat ditingkatkan. Prinsip keterbukaan dalam hal ini diwujudkan dalam bentuk *Earning Per Share* (EPS). *Earning per share* atau laba per lembar saham adalah keuntungan bersih untuk tiap lembar sahamnya yang mampu diraih perusahaan pada saat menjalankan operasinya. *Earning per share* adalah rasio yang menunjukkan pendapatan yang diperoleh setiap lembar saham.

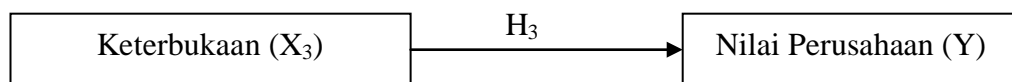
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mindra (2014) diperoleh hasil *Earning Per Share*, Ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage

secara bersama-sama berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Secara parsial variabel profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan dan variabel *earning per share* dan leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diajukan hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

H₀₃ : Keterbukaan (*Earning per Share*) tidak berpengaruh terhadap nilai Perusahaan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

H_{a3} : Keterbukaan (*Earning per Share*) berpengaruh terhadap nilai Perusahaan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).



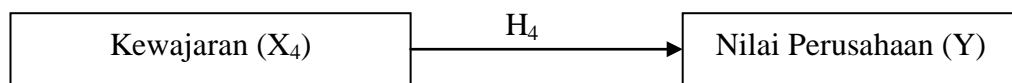
4. Hipotesis Empat

Prinsip kewajaran mengandung arti bahwa seluruh pemangku kepentingan harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan perlakuan yang adil dari perusahaan. Setiap anggota direksi harus melakukan keterbukaan jika menemukan transaksi-transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Prinsip kewajaran dalam hal ini merupakan bentuk kepemilikan institusional. Tarjo (2012) mengemukakan bahwa kepemilikan institusional merupakan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain. Kepemilikan institusional bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan pada umumnya dan manajer sebagai pengelola perusahaan pada khususnya. Menurut Tarjo (2012) bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap nilai pemegang saham. Hal ini berarti menunjukkan, bahwa kepemilikan institusional menjadi mekanisme yang handal sehingga mampu memotivasi manajer dalam meningkatkan kinerjanya yang pada akhirnya dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diajukan hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

Ho₄ : Kewajaran (Kepemilikan Institusional) tidak berpengaruh terhadap nilai Perusahaan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Ha₄ : Kewajaran (Kepemilikan Institusional) berpengaruh terhadap nilai Perusahaan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).



5. Hipotesis Lima

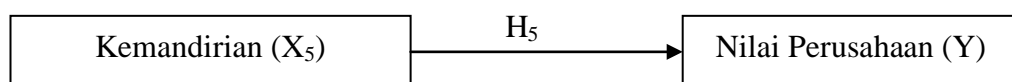
Prinsip kemandirian dalam GCG menuntut para pengelola perusahaan agar dapat bertindak secara mandiri, sesuai peran dan fungsi yang dimilikinya tanpa ada tekanan-tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan sistem operasional perusahaan yang berlaku. Prinsip kemandirian dalam hal ini merupakan bentuk dari Dewan Komisaris Independen.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Alfinur (2016), menunjukkan bahwa komisaris Independen berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Adanya pengaruh positif tersebut disebabkan oleh mekanisme control yang kuat dari komisaris independen terhadap manajemen, dimana mekanisme kontrol tersebut merupakan peran vital bagi terciptanya GCG.

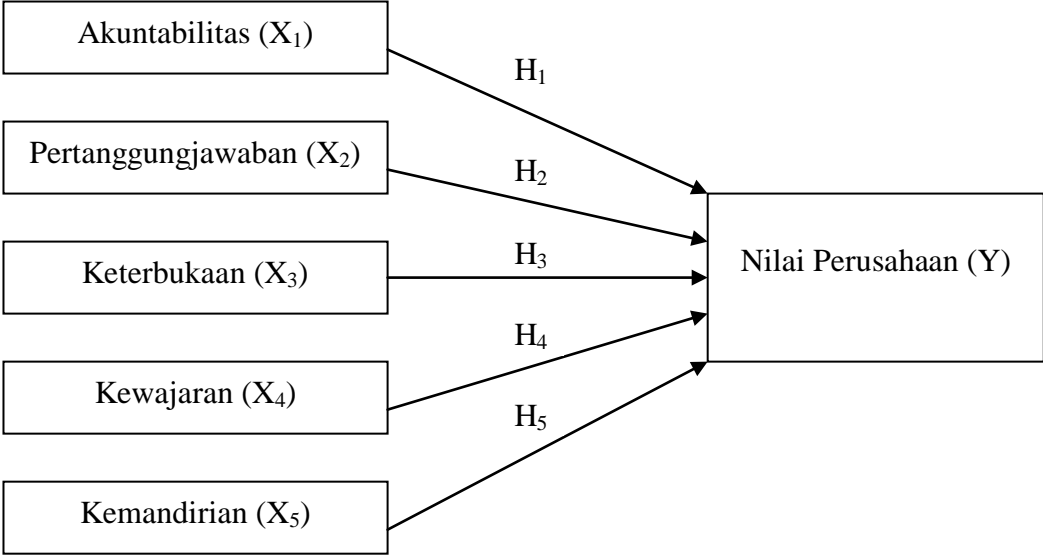
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diajukan hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

Ho₅ : Kemandirian (Dewan Komisaris Independen) berpengaruh terhadap nilai Perusahaan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Ha₅ : Kemandirian (Dewan Komisaris Independen) berpengaruh terhadap nilai Perusahaan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).



3.9 Kerangka Hipotesis Penelitian



Gambar 3.1 Kerangka Hipotesis

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data

4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian

Objek Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Perusahaan Sub Sektor Transportasi yang terdaftar di BEI pada periode tahun 2013-2017. Pemilihan sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria tertentu. Dalam penelitian ini menggunakan 15 perusahaan sebagai sampel. Berikut adalah profil dari perusahaan transportasi yang menjadi sampel dalam penelitian :

1. PT Adi Sarana Armada, Tbk (ASSA)

Perseroan berdiri pada 17 Desember 1999 dengan nama PT Quantum Megahtama Motor. Pada 22 Januari 2003, PT Quantum Megahtama Motor berganti nama menjadi PT Adira Sarana Armada, atau yang dulu lebih dikenal dengan ADIRA Rent (selanjutnya disebut ASSA, kami, atau Perseroan). Diawal pendirian, ASSA bergerak di bidang usaha penyewaan kendaraan dengan jaringan nasional. Seiring dengan perubahan identitas tersebut, Perseroan melakukan perubahan Anggaran Dasar dengan bidang kegiatan usaha diperluas menjadi jasa penyewaan atau rental dan manajemen kendaraan dengan pelanggan utama dari pelanggan korporasi terkemuka di Indonesia. Ekspansi bidang usaha tersebut merupakan wujud konsistensi Perseroan terhadap pertumbuhan industri nasional sekaligus untuk menangkap peluang baru dalam pasar penyewaan kendaraan.

Perubahan identitas Perseroan kembali dilakukan pada 7 September 2009 melalui perubahan nama Perseroan menjadi PT Adi Sarana Armada dengan ASSA sebagai merek dagang utama menggantikan ADIRA rent. Transformasi identitas Perusahaan tersebut merupakan penguatan komitmen ASSA untuk menyediakan solusi penyewaan kendaraan terintegrasi di tingkat nasional,

mulai dari jasa penyewaan jangka panjang dan pendek, sistem pengelolaan kendaraan, pelayanan logistik hingga penyediaan juru mudi profesional.

Layanan penyewaan kendaraan yang ditawarkan oleh ASSA didukung oleh sistem manajemen terintegrasi yang mengedepankan kualitas terbaik. Sistem manajemen tersebut dilengkapi dengan pelayanan prima dan inovatif dari sumber daya manusia yang memiliki kompetensi serta pengalaman memadai dalam industri penyewaan kendaraan.

2. PT Pelayanan Nasional Bina Buana Raya, Tbk (BBRM)

Perseroan didirikan dengan nama PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 1 tanggal 7 Februari 1998 dibuat di hadapan Augi Nugroho Hartadji, S.H., Notaris di Tanjung Pinang, dan telah disahkan melalui keputusan Menkumham melalui surat keputusannya No. C2-14.420 HT.01.01.TH.98 tanggal 22 September 1998. Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat di dunia pelayaran yang dipengaruhi juga oleh pangsa pasar yang terus berubah dan menuntut integritas sebuah perusahaan pelayaran, Perseroan telah berkomitmen untuk menjaga kualitas pelayanannya dan kepeduliannya terhadap lingkungan. Hal ini dibuktikan dengan kemampuan dan komitmen manajemen yang telah mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2008 dan 14001:2004.

Perusahaan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham pada tanggal 9 Januari 2013, dana yang akan diperoleh Perusahaan sekitar USD 14,3 juta. Perusahaan melakukan Penawaran Umum Terbatas atas dengan Hak Memesan Efek terlebih dahulu. Total dana yang diperoleh sebesar Rp.368 milyar dan Perseroan juga melakukan penandatanganan untuk pembelian 8 unit kapal OSV dengan nilai total transaksi USD 170jt.

3. PT Cardig Aero Service, Tbk (CASS)

PT Cardig Aero Services Tbk (Perusahaan) didirikan berdasarkan Akta No. 25 tanggal 16 Juli 2009 oleh Notaris Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H., di Jakarta. Akta Pendirian telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-34028.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 21 Juli 2009, dan telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara No. 62 tanggal 3 Agustus 2010 dengan Tambahan Berita Negara No. 7168 Tahun 2010.

Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir berdasarkan Akta No. 34 Tanggal 13 Juli 2015 yang dibuat oleh Ardi Kristiar, S.H., MBA., sebagai pengganti dari Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan untuk disesuaikan dengan beberapa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yaitu POJK 32/POJK.04/2014, POJK 33/POJK.04/2014. Akta perubahan ini telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0951513 dan tertanggal 14 Juli 2015.

Perusahaan bergerak di bidang perdagangan, keagenan, perwakilan, jasa, angkutan dan industri. Perusahaan mulai beroperasi secara komersil tanggal 1 Januari 2010. Perusahaan berkedudukan di Menara Cardig Lantai 3, Jl. Raya Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jakarta 13650. Perusahaan dikendalikan oleh PT Cardig Asset Management (CAM), induk perusahaan yang berkedudukan di Jakarta. Pemegang saham terbesar CAM adalah PT Cardig International (CI), perusahaan yang berkedudukan di Jakarta

4. PT Humpus Internoda Transportasi, Tbk (HITS)

Pada usia 25 tahun, Perseroan memperkuat fondasi internal, memperkuat sinergitas untuk meningkatkan keunggulan yang berkualitas dan merealisasikan rencana pengembangan secara bijaksana dalam rangka merajut momentum pertumbuhan jangka panjang, siap bersaing di industrinya, baik saat ini maupun di masa mendatang, sekaligus mendukung program Tol Laut Pemerintah guna membangun kejayaan bangsa.

Pada tanggal 21 Desember 1992 PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. berdiri (sebelumnya hanya sebuah divisi LNG PT Humpuss), perusahaan yang bergerak di sektor perkapalan, saat ini diperkuat oleh 1.465 orang karyawan, termasuk 1.280 awak kapal dengan jumlah kapal sebanyak 40 kapal. Tahun

2014, Perseroan melanjutkan proses Transformasi dan memantapkan peran strategis sebagai penyedia transportasi laut terintegrasi dengan 5 segmen usaha yaitu angkutan LNG, angkutan *Petrochemical & Oil*, Kapal Penunjang Kegiatan Lepas Pantai, *Marine Support* dan Jasa Pengelolaan Awak Kapal. Pada 2015, Perseroan melakukan diversifikasi usaha pada bidang angkutan batu bara menjadi barang jadi serta memperluas segmen usaha ke *dredging*.

Tahun 2017, Perseroan mengoperasikan 8 segmen bisnis meliputi Angkutan LNG, Angkutan Petrokimia, Angkutan Minyak, *Offshore Support Vessel*, *Dredging*, *Marine Support*, *Ship Management* serta *Human Capital & Development* Tahun 2017, 25 tahun pertumbuhan yang terus berkelanjutan dari Perseroan, dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai segmen bisnis untuk memberikan nilai tambah bagi Perseroan. Perseroan terus berupaya meningkatkan peluang pasar pengangkutan energi beserta layanan jasa pendukungnya. Secara bertahap terus meningkatkan kapasitas serta kapabilitasnya agar dapat memaksimalkan peluang yang ada.

Berdasarkan Akta No. 13 tanggal 27 Mei 2015, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, yaitu menjalankan usaha pengangkutan umum di laut, baik pengangkutan orang maupun barang, termasuk ekspedisi, pengepakan dan pergudangan. Berdasarkan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki oleh Perseroan erat terkait dengan bidang usaha yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan. Perseroan terus memposisikan diri sebagai perusahaan penyedia jasa transportasi laut terintegrasi dengan 8 Segmen Bisnis, yaitu: Angkutan LNG, Angkutan Petrokimia, Angkutan Minyak, *Offshore Support Vessel*, *Dredging*, *Marine Support*, *Ship Management* serta *Human Capital & Development*. Ke-8 segmen bisnis tersebut merupakan hasil dari transformasi bisnis Perseroan yang terus berkembang secara berkelanjutan.

5. PT Indonesia Air Transport & Infrastruktur, Tbk (IATA)

PT Indonesia Transport & Infrastructure Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha pengangkutan udara niaga dan jasa angkutan udara.

Berdiri pada tanggal 10 September 1968 dengan nama PT Indonesia Air Transport, Perseroan yang berkantor di Jakarta Pusat ini memiliki pangkalan utama di Bandara Internasional Halim Perdanakusuma Jakarta, memiliki pangkalan kedua yang digunakan untuk melayani pelanggan perusahaan minyak dan gas dan memiliki hanggar (fasilitas perawatan pesawat), berlokasi di Bandara Internasional Sepinggian, Balikpapan, Kalimantan Timur dan Bandara I Gusti Ngurah Rai, Denpasar, Bali.

PT. Indonesia Transportasi & Infrastruktur, Tbk merupakan anak perusahaan dari PT Global Transport Services. Selama tahun-tahun pertama beroperasi, Perseroan menyediakan layanan penerbangan untuk Pertamina dan kontraktor minyak asing.

Saat ini, Perseroan menyediakan berbagai layanan penerbangan berkualitas, seperti penyewaan pesawat dan helikopter, kargo udara, bengkel pemeliharaan dan jasa terkait lainnya, untuk industri minyak, gas dan pertambangan di Indonesia dan Asia Tenggara, di darat dan lepas pantai. Mengkhususkan diri dalam penyediaan jasa evakuasi medis lewat udara, kargo, bengkel pemeliharaan dan third-party operation, geofisika, survey foto udara serta layanan udara bagi industri pariwisata di berbagai daerah terpencil di Indonesia, saat ini Perseroan mengoperasikan berbagai jenis pesawat bersayap tetap serta helikopter, antara lain EC 155 B1, pesawat penumpang, dan ATR 42-500.

Untuk mendukung operasinya, Perseroan melakukan investasi cukup besar dengan membangun fasilitas pemeliharaan yang komprehensif di Jakarta dan di Balikpapan, Kalimantan Timur. Perseroan mengembangkan kapabilitas overhaul pesawat sayap tetap dan helikopter secara in-house dan memenuhi standar yang tinggi sesuai dengan standar keselamatan yang berlaku di dunia. Senantiasa mengutamakan keselamatan, pilot dan mekanik Perseroan menjalani program pendidikan dan pelatihan di luar negeri secara teratur, untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan mereka dalam

menangani berbagai jenis pesawat yang menjadi bagian armada Perseroan. Selain itu, Perseroan juga melakukan audit keselamatan dengan melibatkan otoritas keselamatan penerbangan, baik dari dalam negeri dan luar negeri.

Untuk memperkuat kegiatan usahanya, Perseroan menambah armadanya dengan mendatangkan Embraer Legacy 600 dengan nomor registrasi PK-TFS. Pesawat jet ini melakukan penerbangan perdana pada tanggal 21 Januari 2014. Pada tanggal 23 Januari 2014, Perseroan mengembangkan usahanya dengan memasuki industri infrastruktur dan mengubahnya nama menjadi PT Indonesia Transportasi & Infrastructure Tbk.

Pada tanggal 6 Februari 2014, Perseroan melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek terlebih dahulu (Non-HMETD) sebagai upaya konversi utang dengan menerbitkan 4.769.461.380 saham baru seri C dengan nilai nominal Rp 96. Perseroan melakukan Penambahan Modal Tanpa HMETD dengan menerbitkan 652.692.000 lembar saham seri B sebesar Rp 32.634.600.000,- pada tahun 2017

6. PT ICTSI Jasa Prima, Tbk (KARW)

PT ICTSI Jasa Prima Tbk (“Perusahaan”) didirikan di Jakarta dengan nama PT Karwell Indonesia Knitting & Garment Industry sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1970 mengenai penanaman modal dalam negeri berdasarkan akta Notaris Soetanto, S.H., No. 11 tanggal 18 Februari 1978. Akta pendirian Perusahaan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dalam Surat Keputusan No. YA5/36/17 tanggal 18 Februari 1981 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 78 Tambahan No. 3668 tanggal 28 September 1990. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami perubahan dengan akta Notaris Imas Fatimah, S.H., No. 09 tanggal 9 Juli 2008, mengenai perubahan dan penyesuaian Anggaran Dasar Perusahaan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Akta perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-86994.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 18 November 2008.

Pada tanggal 3 Mei 2012, ICTSI Far East Pte. Ltd., telah melakukan pengambilalihan atas saham Perusahaan yang dimiliki dan dikendalikan secara langsung oleh PT Karya Estetikamulia dan beberapa pihak dalam kelompok masyarakat. Sebagaimana dimuat dalam Pengumuman Pengambilalihan Perusahaan Terbuka tanggal 4 Mei 2012 dan memuat Keterbukaan Informasi Dalam Rangka Penawaran Tender Wajib tanggal 30 Mei 2012, rencana dan tujuan dari ICTSI Far East Pte. Ltd., pemegang saham pengendali Perusahaan, adalah mengubah bidang usaha Perusahaan sehingga Perusahaan secara langsung maupun melalui entitas anaknya dapat berkiprah dalam pengembangan, pembangunan, pengoperasian sarana dan prasarana logistik maritim serta jasa-jasa terkait.

Selanjutnya, sesuai dengan akta Notaris Dewi Kusumawati, S.H., No. 20 tanggal 25 Juli 2012, telah disetujui perubahan nama Perusahaan dari semula PT Maharlika Indonesia Tbk menjadi PT ICTSI Jasa Prima Tbk. Akta perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusan No. AHU43425.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 9 Agustus 2012.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta Notaris Dini Lastari Siburian, S.H., No. 43 tanggal 30 Maret 2016, mengenai perubahan dan penyesuaian Anggaran Dasar Perusahaan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Akta perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHUAH.01.03-0039405 tanggal 12 April 2016.

7. PT Logindo Samudera Makmur, Tbk (LEAD)

PT Logindo Samudramakmur Tbk didirikan di tahun 1995 dan berdomisili di Graha Corner Stone, Jalan Rajawali Selatan II No.1, Gunung Sahari Utara,

Jakarta Pusat, dan saat ini Logindo telah menjadi salah satu operator utama di bidang penyediaan kapal pendukung lepas pantai (*offshore support vessel*). Dimulai dengan beberapa kapal tunda dan tongkang yang dimiliki, pada tahun 1997 perseroan memfokuskan aktivitas usahanya sebagai penyedia jasa pendukung kelautan hulu migas dan memperoleh kontrak kerja pertamanya dari *Total E&P Indonesia*.

Sekarang perseroan telah menjadi salah satu perusahaan publik yang mampu menyediakan berbagai macam kapal-kapal pendukung lepas pantai, diantaranya: *crew boats, diving support vessels, platform support vessels, utility supply vessels, anchor handling tug, anchor handling tug and supply, hopper barges* dan *accomodation work barges*.

Dengan meningkatnya eksplorasi dan kegiatan pengeboran di laut dalam, Perseroan juga memperkuat armadanya dengan kapal-kapal yang memiliki *Dynamic Positioning System* (DP 1 dan DP 2) dan melatih awak kapal menjadi awak kapal yang berkualitas dan berpengalaman serta selalu menjaga standar keamanan yang tertinggi dalam pengoperasian kapal-kapal perseroan. Dengan pengalaman lebih dari 20 tahun, Logindo selalu menyediakan armada-armada dengan kualitas terbaik dan awak kapal yang tangguh dan handal yang telah dipercaya oleh banyak perusahaan-perusahaan minyak dan gas bumi lepas pantai terkemuka. Perseroan telah menerima banyak penghargaan dari para pelanggannya atas jasa yang telah diberikan.

8. PT Mitra International Resources, Tbk (MIRA)

PT Mitra International Resources Tbk (“Perseroan”) yang semula bernama PT Mitra Rajasa Tbk didirikan berdasarkan Akta No. 285 tanggal 24 April 1979 dari Notaris Ridwan Suselo, SH. Akta Pendirian Perusahaan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. Y.A.5/377/14 tanggal 12 Oktober 1979 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 45 tanggal 3 Juni 1980, Tambahan No. 387.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir adalah dengan Akta No. 28 tanggal 30 Juni 2015 dari Notaris Eko Putranto, SH, mengenai penyesuaian ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan “OJK” No. 32/POJK.04/2014 dan No. 33/POJK.04/2014. Akta perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam keputusan No. AHU-AH.01.03-0947883 tanggal 3 Juli 2015.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir adalah dengan Akta No. 09 tanggal 26 Mei 2017 dari Notaris Eko Putranto, SH, mengenai Rapat Umum Pemegang Saham. Akta perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam keputusan No. AHU-AH.01.03-0145901 tanggal 14 Juni 2017.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan adalah menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan darat, perdagangan, jasa, pembangunan, pertambangan dan perindustrian. Pada saat ini, Perseroan bergerak dalam bidang industri jasa transportasi darat serta melakukan investasi pada Entitas Anak. Perseroan berkedudukan di Jakarta, dengan alamat sebagai berikut:

a. Kantor Pusat

Gedung Grha Mitra, Jalan Pejaten Barat No. 6, Pasar Minggu, Jakarta Selatan

b. Kantor Operasional

Jalan Gunung Putri Raya KM 20, Gunung Putri-Bogor

9. PT Steady Safe, Tbk (SAFE)

PT. Steady Safe, Tbk (Perseroan) didirikan pada tanggal 21 Desember 1971 dengan nama PT. Tanda Widjaja Sakti dalam rangka Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri No. 6 Tahun 1968 *juncto* Undang-Undang No. 12 Tahun 1970 berdasarkan akta Notaris Ridwan Suselo, No. 97. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dalam Surat

Keputusannya No. Y.A.5/61/23 tanggal 12 Februari 1976 dan diumumkan dalam Lembaran Berita Negara No. 14 Tambahan No. 197 tanggal 16 Februari 1982. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir dinyatakan dengan akta Notaris F.X. Budi Santoso Isbandi, S.H. No. 187, tanggal 15 Agustus 2008, agar sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007. Perubahan ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00250.AH.01.02 tanggal 5 Januari 2009.

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Perseroan ruang lingkup kegiatan Perseroan meliputi usaha pengangkutan, perbengkelan, perdagangan, dan real estat. Sampai saat ini Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha bidang perdagangan dan real estat.

Perseroan telah memperoleh izin yang diperlukan dari instansi yang berwenang dan telah melakukan kegiatan komersialnya sejak tahun 1972. Dengan wilayah operasi meliputi wilayah Jabotabek. Jumlah karyawan Perseroan dan Entitas Anak rata-rata 18 dan 16 karyawan pada 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012.

Perseroan mengelola armada taksi dan bus dengan nama "*Steady Safe*". Perseroan juga memiliki baik secara langsung maupun tidak langsung saham Entitas Anak pada Perseroan sejenis, yaitu pada PT. Wahana Artha Sentosa (WAS), PT. Luhursatria Dwiraya (Luhur), PT. Citra Pancakabraja (Citra), PT Sonnypong Yatim (SPY), PT. Sembada Permai Sejati (SPS), PT. Buana Metropolitan Taxi (BMT), dan T. Hasmuda Internusa (Hasmuda), yang masing-masing mengelola armada taksi dengan nama Spirit, Transit Cab, Swadharma, Cherry, Marline, Jakarta International Taxi, Metropolitan, dan Rajawali.

10. PT Sidomulyo Selaras, Tbk (SDMU)

PT Sidomulyo Selaras Tbk ("Perseroan") adalah perusahaan transportasi pengangkutan dan penyimpanan bahan berbahaya dan beracun, diantaranya

adalah bahan-bahan kimia, minyak dan gas untuk kebutuhan sektor-sektor industri. Perseroan didirikan pada tanggal 19 Januari 1993 berdasarkan Akta No. 42 yang dibuat dihadapan Notaris Trisnawati Mulia di Jakarta. Perseroan memiliki kantor pusat yang berkedudukan di Jalan Gunung Sahari III No. 12A, Jakarta.

Pada tanggal 12 Juli 2011, Perseroan melaksanakan *Initial Public Offering* (IPO) untuk memaksimalkan kinerja dan layanan kepada pelanggan. Perseroan menggunakan sebagian besar dana yang diperoleh dari IPO tersebut untuk pembelian armada baru sebagai respon atas tingginya permintaan jasa transportasi di sektor-sektor industri.

Para pelanggan utama perusahaan ini diantaranya adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor industri kimia hulu yang menghasilkan bahan kimia dasar baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor. Pada tahun 2016, Perseroan menambah 1 (satu) anak perusahaan yaitu PT Petro Nusa Kita yang bergerak di bidang usaha pengangkutan minyak mentah. PT Petro Nusa Kita didirikan berdasarkan Akta No. 1 tanggal 1 September 2016 yang dibuat oleh notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSi di Jakarta.

11. PT Samudera Indonesia, Tbk (SMDR)

PT Samudera Indonesia Tbk (untuk selanjutnya disebut sebagai “Perusahaan” ataupun “Samudera Indonesia”) mengawali perjalanannya dalam industri transportasi dan logistik nasional sebagai sebuah perusahaan keagenan pada tahun 1950an. Dipelopori oleh Bapak Soedarpo Sastrosatomo, Samudera Indonesia resmi menyandang status sebagai perusahaan pelayaran pada tanggal 13 November 1964 seperti dinyatakan dalam Akta No. 33 tahun 1964 oleh Notaris Soeleman Ardjasmita, S.H.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maka kegiatan usaha Perusahaan meliputi kegiatan *shipping* termasuk pengangkutan barang dengan kapal dan kegiatan lainnya dengan bertindak sebagai agen baik keagenan lokal

ataupun luar negeri maupun keagenan umum untuk perusahaan *shipping* lainnya.

Sejalan dengan pertumbuhan usaha yang pesat dan meningkatnya kompleksitas organisasi, Perusahaan kemudian melakukan restrukturisasi usaha dengan membentuk satu konsolidasi grup usaha yang membawahi 3 (tiga) unit usaha yaitu *shipping*, keagenan dan pelabuhan, serta *forwarding*. Proses restrukturisasi yang dilaksanakan pada tahun 1989 tersebut bertujuan untuk mendorong pengelolaan dan koordinasi antar unit usahanya secara lebih efektif dan efisien khususnya untuk aspek pemasaran. Seiring dengan perkembangannya, saat ini Perusahaan memiliki empat lini usaha yakni *shipping* (*Samudera Shipping*), keagenan (*Samudera Agencies*), logistik (*Samudera Logistics*), dan pelabuhan (*Samudera Terminal*).

Melalui keempat lini usaha tersebut, Perusahaan menghadirkan layanan jasa transportasi dan logistik terpadu (*integrated logistics*) dari “hulu” ke “hilir” (*end-to-end logistics*) dalam satu atap. Adapun jenis layanan yang ditawarkan mencakup layanan pergudangan dan pusat distribusi (*warehouse and distribution center*), depo peti kemas (*container depot*), transportasi darat (*inland transport*), pelabuhan (*terminal*), pelayaran peti kemas (*container shipping*), pengangkutan barang curah kering, cair, dan jasa pendukung lepas pantai (*bulk carrier, tanker, and offshore*), logistik pihak ketiga (*third-party logistics*) pengangkutan alat berat (*project logistics*), hingga keagenan (*agency*), dan pengelolaan kapal (*ship management*).

Dengan terus berkaca pada pengalaman dan perjalanannya selama lebih dari 50 tahun, Samudera Indonesia tidak pernah berhenti memandang ke depan dan mengembangkan diri menjadi nama yang dapat dipercaya dalam kegiatan transportasi barang dan logistik. Hingga akhir 2014, Perusahaan memiliki 4.000 karyawan, lebih dari 30 anak usaha, dan 17 kantor cabang yang tersebar di berbagai penjuru Indonesia serta sejumlah kantor perwakilan di wilayah Asia. Ke depannya, Perusahaan akan terus berusaha mempertahankan peran

sebagai pemimpin pasar di Indonesia dan memperluas jangkauan pasarnya dalam dunia maritim internasional melalui kemitraan strategis dengan perusahaan dalam negeri maupun asing.

12. PT Soechi Lines, Tbk (SOCI)

PT Soechi Lines Tbk ("Perusahaan") didirikan di Jakarta berdasarkan Akta Notaris Meissie Pholuan, S.H., No. 16 tanggal 13 Agustus 2010. Akta Pendirian ini telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-44960.AH.01. 01.Tahun 2010 tanggal 22 September 2010 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 16 tanggal 24 Februari 2012, Tambahan No. 3923.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir berdasarkan (i) Akta Notaris Irma Bonita, S.H., No. 14, tanggal 19 Agustus 2014, mengenai perubahan anggaran dasar Perusahaan untuk disesuaikan dengan ketentuan Bapepam-LK No. IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perusahaan yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat No. AHU-06828.40.20.2014 tanggal 21 Agustus 2014, (ii) Akta Notaris Irma Bonita S.H., No. 27 tanggal 26 Maret 2015, mengenai perubahan pasal 4(2) Anggaran Dasar Perusahaan sehubungan dengan pelaksanaan penawaran umum saham Perusahaan. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat No. AHUUAH.01.03-0925982 tanggal 21 April 2015. Perusahaan berkedudukan di Jakarta dan kantor pusatnya beralamat di Gedung Sahid Sudirman, Sahid Sudirman Center Lt. 51, Jl. Jend. Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah bergerak dalam bidang perdagangan impor dan ekspor, jasa konsultasi, pembangunan, transportasi, percetakan, pertanian, perbengkelan

dan industri lainnya. Saat ini, Perusahaan bergerak di bidang jasa konsultasi manajemen sedangkan Entitas Anak bergerak di bidang pelayaran dan pembangunan kapal. Perusahaan memulai usaha komersial pada Januari 2012. Perusahaan tergabung dalam Grup Soechi dan entitas induk terakhir adalah PT Soechi Group.

13. PT Pelayaran Tempuran Emas, Tbk (TMAS)

Perjalanan Perseroan dimulai pada tanggal 17 September 1987 saat Bpk. Harto Khusumo dan Bpk. Koentoyo bersepakat untuk mendirikan sebuah perusahaan pelayanan pengiriman barang dalam peti kemas melalui jalur laut, dengan nama PT Tempuran Emas. Enam tahun kemudian, Perseroan berubah menjadi perusahaan terbuka, tepatnya pada tanggal 25 Juni 2003, melalui penawaran umum saham Perseroan sebanyak 451.000.000 lembar saham dengan kode “TMAS”. Pada tanggal 9 Juli 2003 nama Perseroan resmi tercatat di lantai Bursa Efek Indonesia dengan nama PT Pelayaran Tempuran Emas Tbk dan menjadi perusahaan pelayaran pengangkut peti kemas nasional pertama yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Awalnya, Perseroan menjalankan pelayanan pengangkutan peti kemas dengan menggunakan kapal sewaan. Namun seiring perjalanan waktu dan perkembangan bisnis Perseroan yang pesat, Perseroan terus menambah daya saing dan memperbesar kapasitasnya dengan penambahan armada, sarana penunjang serta memperluas jangkauan pelayanan.

Untuk menjalankan usahanya, sampai dengan akhir 2017, Perseroan memiliki 36.270 unit peti kemas dan 34 unit kapal dengan total kapasitas angkut 25.785 TEUs, 384.540 DWT. Sarana penunjang kegiatan utama Perseroan dinilai menjadi faktor penting untuk meningkatkan daya saing. Adanya alat bongkar muat seperti Harbor Mobile Crane, Reach Stacker, Container Forklift, serta depo peti kemas yang dimiliki oleh anak perusahaan dapat menjadi dukungan utama bagi Perseroan untuk memberikan pelayanan yang terintegrasi bagi para pelanggannya. Saat ini kegiatan utama Perseroan telah didukung oleh 5 entitas

anak perusahaan, yang masing-masing memiliki spesialisasi, yaitu PT Pelayaran Tirtamas Express yang bergerak di bidang manajemen perkapalan, PT Temas Pendulum Nusantara yang bergerak di bidang usaha depo peti kemas, Anemi Maritime Co. Ltd, yang bergerak di bidang manajemen peti kemas, PT Escorindo Stevedoring yang bergerak di bidang bongkar muat, dan PT Asia Marine Temas, entitas anak yang baru didirikan pada tanggal 18 Agustus 2017, yang bergerak di bidang manajemen perkapalan.

Jangkauan layanan yang diberikan oleh Perseroan terus mengalami perkembangan. Hingga akhir tahun 2017 Perseroan telah membuka 20 kantor cabang antara lain di Medan, Pekanbaru, Jakarta, Surabaya, Pontianak, Banjarmasin, Tarjun, Samarinda, Makassar, Bitung, Ambon, Sorong, Manokwari, Jayapura, Palembang, Batam, Padang, Bengkulu, Merauke, dan Fakfak, serta 18 keagenan di seluruh wilayah Indonesia, yaitu di Malahayati, Dumai, Kumai, Sampit, Balikpapan, Berau, Tarakan, Palu, Kupang, Tual, Dobo, Kaimana, Timika, Biak, Serui, Nabire, Baubau, dan Lhokseumawe.

14. PT Wintermar Offshore Marine, Tbk (WINS)

Dengan rekam jejak yang sangat baik selama 47 tahun, Wintermar telah mengukuhkan dirinya sebagai operator terdepan dalam jasa pendukung kegiatan minyak bumi dan gas lepas pantai di Indonesia. Dengan armada yang baru dan mutakhir, Wintermar memiliki keunggulan dalam menyediakan solusi untuk seluruh kebutuhan operasional lepas pantai. Kapal pendukung lepas pantai/Offshore Support Vessel (OSV) yang sangat beragam, dirancang untuk menawarkan solusi logistik yang inovatif serta terintegrasi untuk semua klien domestik dan internasional Perusahaan yang terus bertambah.

Sebagai perusahaan Indonesia yang beroperasi dengan standar internasional yang tinggi, Wintermar dikenal sebagai pemimpin dalam industri lepas pantai Indonesia dan dalam beberapa tahun terakhir ini telah merambah kawasan ke 12 negara di Asia Pasifik, Timur Tengah dan Amerika Selatan.

Perhatian Wintermar terhadap kualitas kapal dan awak kapal, didukung dengan pengalaman puluhan tahun dalam industri minyak bumi dan gas lepas pantai, telah membuahkan kepercayaan dari para pelaku utama industri minyak bumi dan gas di Indonesia. Dimulai dari penarikan rig jarak jauh hingga pengoperasian suplai platform yang presisi, para klien terus memberikan kepercayaan mereka terhadap pelayanan Perusahaan untuk mempertahankan dan merampingkan aktivitas mereka dalam tahap eksplorasi, pengembangan, produksi dan pasca produksi.

Armada Wintermar telah berkembang dan bertambah untuk menyesuaikan serta mengantisipasi kebutuhan klien lokal maupun internasional yang meningkat. Dengan proyek-proyek pengeboran laut dalam di Indonesia yang semakin mutakhir, Perusahaan memiliki awak kapal yang berkualitas dan berpengalaman dalam pengoperasian yang melibatkan Dynamic Positioning System (DP1 dan DP2). Dengan armada Perusahaan yang sekarang mencakup segmen industri kapal pendukung lepas pantai yang bernilai lebih tinggi serta beroperasi dengan standar keselamatan tertinggi, Perusahaan menyediakan dukungan logistik unggul yang tepat sasaran di saat pangsa pasar membutuhkannya.

Pada saat yang bersamaan, tenaga kerja profesional di darat bekerja tanpa henti untuk menyediakan solusi terintegrasi yang andal untuk kebutuhan klien. Sistem teknologi informasi yang maju memungkinkan pemantauan pergerakan armada dengan satelit secara real time oleh tim kapal di darat sedangkan perawatan dan inventaris kapal dikendalikan oleh program khusus manajemen kapal. Tim manajemen yang berpengalaman dengan keahlian yang tinggi di Indonesia memimpin kegiatan di kantor, menciptakan serta memelihara nilai-nilai Perusahaan bagi para pemegang saham sembari mengembangkan bisnis guna mencapai visi Perusahaan.

Tahun 2011, Wintermar Offshore Marine Group menjadi perusahaan pelayaran pertama di Indonesia yang mendapatkan sertifikasi Sistem

Manajemen Terintegrasi oleh Lloyd's Register Quality Assurance, terdiri dari ISO 9001:2008 (Kualitas), ISO 14001:2004 (Lingkungan) dan OHSAS 18001:2007 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja).

4.1.2 Deskripsi Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat lima variabel bebas yaitu Akuntabilitas (X_1), Pertanggungjawaban (X_2), Keterbukaan (X_3), Kewajaran (X_4) dan Kemandirian (X_5) dan satu variabel terikat yaitu Nilai Perusahaan (Y). Berikut ini adalah hasil pengolahan data :

1. Perhitungan Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas memuat kewenangan yang harus dimiliki oleh dewan komisaris dan dewan direksi, beserta kewajibannya kepada pemegang saham dan *stakeholders* lainnya. Dewan direksi, bertanggung jawab atas keberhasilan pengelolaan perusahaan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pemegang saham. Dewan komisaris, bertanggung jawab atas keberhasilan pengawasan dan wajib memberikan nasehat kepada direksi atas pengelolaan perusahaan, sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Prinsip akuntabilitas dalam hal ini diprosikan oleh kepemilikan manajemen.

Kepemilikan manajemen adalah proporsi pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan. Kepemilikan manajemen, diukur dari persentase kepemilikan saham oleh manajemen (Siallagan dan Machfoedz, 2013).

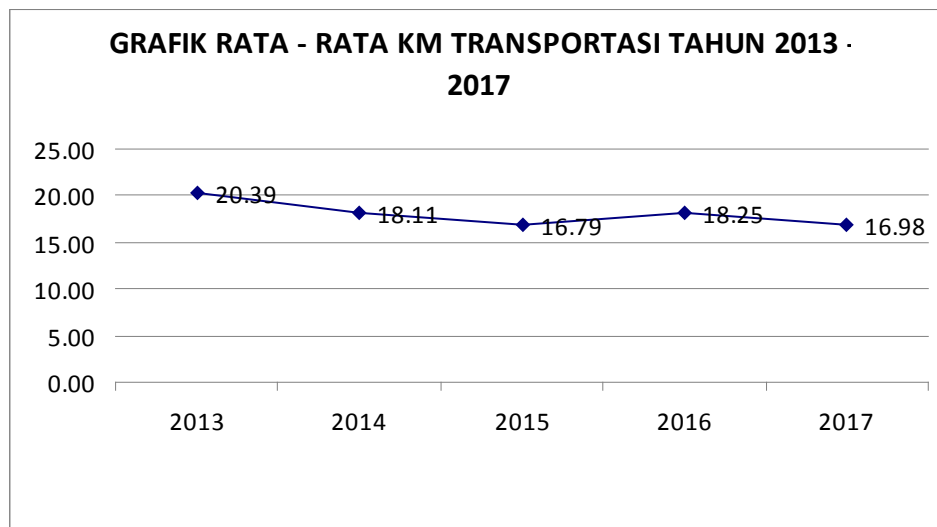
$$\text{Kepemilikan Manajemen} = \frac{\sum \text{saham yang dimiliki manajer}}{\sum \text{saham yang beredar}} \times 100\%$$

Tabel 4.1 Rata-rata Akuntabilitas

No	Tahun	Rata-rata Akuntabilitas (%)
1	2013	20,39
2	2014	18,11
3	2015	16,79
4	2016	18,25
5	2017	16,98

Sumber: Data Diolah (2019)

Grafik 4.1 Hasil Perhitungan Rata-rata Pertumbuhan Akuntabilitas



Sumber: Data Diolah (2019)

Berdasarkan grafik 4.1 diketahui bahwa nilai rata-rata Akuntabilitas dari tahun 2013 sampai dengan 2017 mengalami fluktuasi cenderung menurun. Tahun 2014 mengalami peningkatan dari 20,39 menjadi 18,11, kemudian pada tahun 2015 menurun kembali lagi menjadi 16,79. Pada tahun 2016 mengalami peningkatan pada level 18,25 dan tahun 2017 kembali menurun menjadi 16,98.

2. Perhitungan Pertanggungjawaban

Prinsip pertanggungjawaban menuntut perusahaan maupun pimpinan dan manajer perusahaan melakukan kegiatannya secara bertanggung jawab. Tanggung jawab perusahaan dalam hal ini merupakan tanggung jawab kepada sosial atau lebih dikenal dengan *corporate social responsibility*.

Pengukuran *corporate social responsibility* menggunakan variabel dummy yang apabila:

- 1) Score 0 bila tidak mengungkapkan dalam laporan keuangan
- 2) Score 1 bila mengungkapkan dalam laporan keuangan

$$CSRI = \frac{\sum X_{ij}}{N_j} \times 100\%$$

CSRI = *Corporate Social Responsibility Disclosure Index* Perusahaan

$\sum X_{ij}$ = Jumlah item untuk perusahaan j, $n_j < 78$

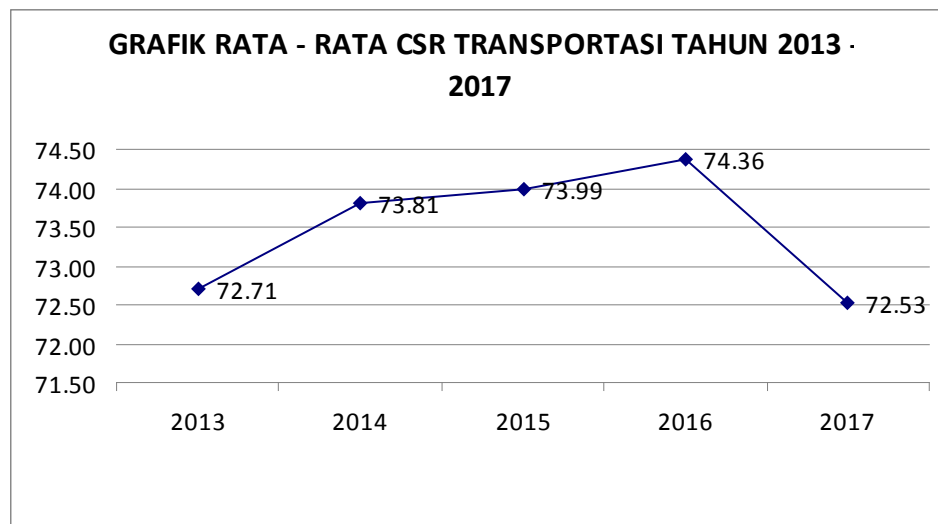
Nj = Dummy variabel, 1 = jika item diungkapkan dan 0 = jika item tidak diungkapkan

Tabel 4.2 Rata-rata Pertanggungjawaban

No	Tahun	Rata-rata Pertanggungjawaban (%)
1	2013	72,71
2	2014	73,81
3	2015	73,99
4	2016	74,36
5	2017	72,53

Sumber: Data Diolah (2019)

Grafik 4.2 Hasil Perhitungan Rata-rata Pertanggungjawaban



Sumber: Data diolah (2019)

Berdasarkan grafik 4.2 diketahui bahwa nilai rata-rata Pertanggungjawaban pada tahun 2013-2017 cenderung berfluktuasi yaitu pada tahun 2013 sebesar 72,71 dan pada tahun 2014 sebesar 73,81. Pada tahun 2015 mengalami kenaikan menjadi 73,99 dan pada tahun 2016 sebesar 74,36. Sedangkan pada tahun 2017 mengalami penurunan kembali menjadi 72,53.

3. Pehitungan Keterbukaan

Adanya prinsip keterbukaan, maka informasi harus diungkapkan secara tepat waktu dan akurat. Informasi yang diharapkan antara lain keadaan keuangan, kinerja keuangan, kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Prinsip keterbukaan dalam GCG ini dilakukan agar pemegang saham dan orang lain

mengetahui keadaan perusahaan, sehingga nilai pemegang saham dapat ditingkatkan. Prinsip keterbukaan dalam hal ini diwujudkan dalam bentuk *Earning Per Share* (EPS).

Earning Per Share menunjukkan besarnya laba bersih perusahaan yang siap dibagikan untuk semua pemegang saham perusahaan. *Earning Per Share* dihitung dengan rumus:

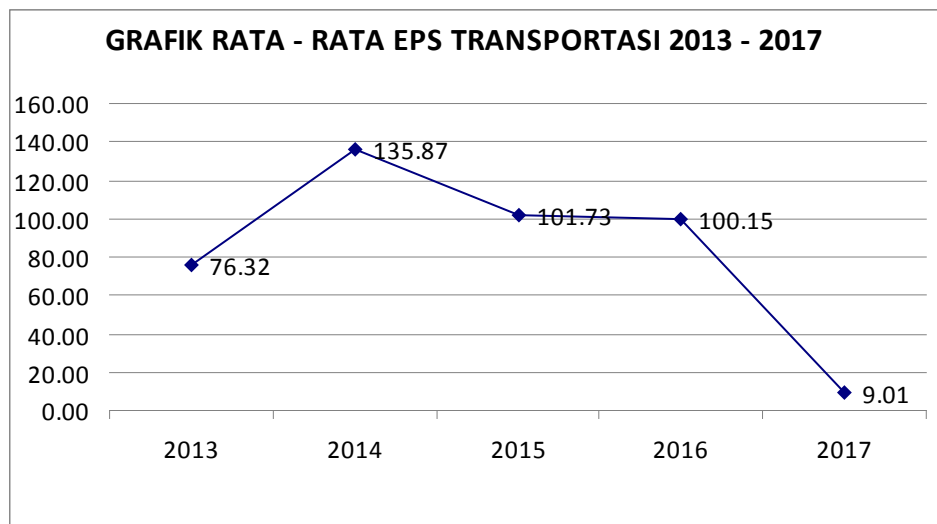
$$Earning\ Per\ Share = \frac{\text{Laba Bersih setelah Pajak}}{\text{Jumlah Saham Biasa yang Beredar}}$$

Tabel 4.3 Rata-rata Keterbukaan

No	Tahun	Rata-rata Keterbukaan (Rp)
1	2013	73,62
2	2014	135,87
3	2015	101,73
4	2016	100,15
5	2017	9,01

Sumber: Data Diolah (2019)

Grafik 4.3 Hasil Perhitungan Rata-rata Keterbukaan



Sumber : Data diolah 2019

Berdasarkan grafik 4.3 diketahui bahwa nilai rata-rata keterbukaan pada tahun 2013-2017 cenderung berfluktuasi yaitu pada tahun 2013 sebesar 76,32 dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 135,87. Pada tahun 2015 mengalami

penurunan menjadi 101,73 dan pada tahun 2016 juga menurun menjadi 100,15 dan pada tahun 2017 juga mengalami penurunan kembali menjadi 9,01.

4. Perhitungan Kewajaran

Prinsip kewajaran mengandung arti bahwa seluruh pemangku kepentingan harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan perlakuan yang adil dari perusahaan. Setiap anggota direksi harus melakukan keterbukaan jika menemukan transaksi-transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Prinsip kewajaran dalam hal ini merupakan bentuk kepemilikan institusional.

Kepemilikan institusional merupakan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Tarjo, 2012). Kepemilikan institusional, diukur dari persentase kepemilikan saham oleh institusi (Agoes, 2011), sebagai berikut:

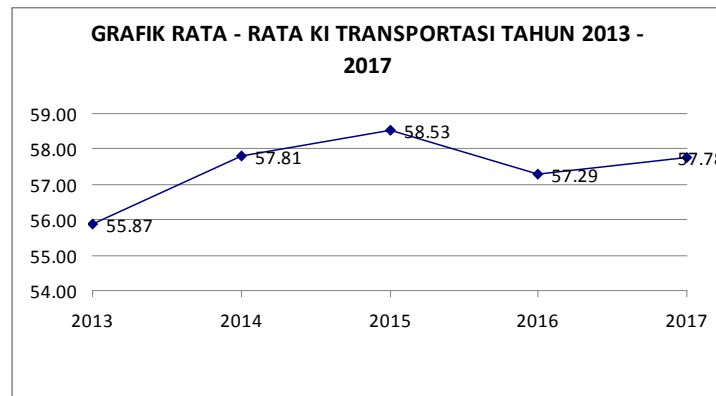
$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\sum \text{saham yang dimiliki institusi}}{\sum \text{saham yang beredar}} \times 100\%$$

Tabel 4.4 Rata-rata Kewajaran

No	Tahun	Rata-rata Kewajaran (%)
1	2013	55,87
2	2014	57,81
3	2015	58,53
4	2016	57,29
5	2017	57,78

Sumber: Data Diolah (2019)

Grafik 4.4 Hasil Perhitungan Rata-rata Kewajaran



Sumber: Data diolah (2019)

Berdasarkan grafik 4.4 diketahui bahwa nilai rata-rata Kewajaran pada tahun 2013-2017 cenderung berfluktuasi yaitu pada tahun 2013 sebesar 55,87 dan pada tahun 2014 sebesar 57,81. Pada tahun 2015 mengalami kenaikan menjadi 58,53 dan pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 57,29. Sedangkan pada tahun 2017 meningkat kembali menjadi 57,78.

5. Perhitungan Kemandirian

Prinsip kemandirian dalam GCG menuntut para pengelola perusahaan agar dapat bertindak secara mandiri, sesuai peran dan fungsi yang dimilikinya tanpa ada tekanan-tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan sistem operasional perusahaan yang berlaku. Prinsip kemandirian dalam hal ini merupakan bentuk dari Keterbukaan.

Keterbukaan adalah jumlah keterbukaan dalam perusahaan. Keterbukaan, diukur dari persentase komisaris independen terhadap jumlah keseluruhan anggota dewan komisaris (Lastanti, 2015), sebagai berikut:

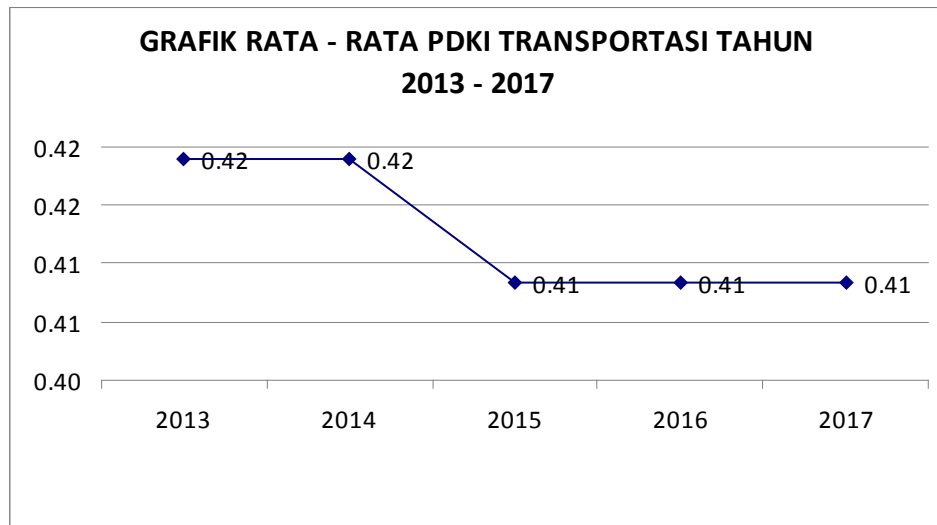
$$PDKI = \frac{\sum \text{Komisaris Independen}}{\sum \text{anggota dewan komisaris}} \times 100\%$$

Tabel 4.5 Rata-rata Kemandirian

No	Tahun	Rata-rata Kemandirian (%)
1	2013	0,42
2	2014	0,42
3	2015	0,41
4	2016	0,41
5	2017	0,41

Sumber: Data Diolah (2019)

Grafik 4.5 Hasil Perhitungan Rata-rata Kemandirian



Sumber: Data diolah (2019)

Berdasarkan grafik 4.5 diketahui bahwa nilai rata-rata Kemandirian pada tahun 2013-2014 cenderung tetap atau tidak mengalami perubahan yaitu sebesar 0,42, dan mengalami penurunan pada tahun 2015-2017 menjadi 0,41.

6. Perhitungan Nilai Perusahaan

Nilai Perusahaan merupakan harga yang tersedia dibayar oleh calon pembeli andai perusahaan tersebut dijual, dalam jangka panjang tujuan perusahaan adalah memaksimalkan Nilai Perusahaan. Semakin tinggi Nilai Perusahaan menggambarkan semakin sejahtera pula pemiliknya.

Nilai Perusahaan akan tercermin dari harga pasar sahamnya Para akademisi dan analis di bidang keuangan mengembangkan berbagai konsep nilai sebagai upaya memahami tingkah laku harga saham. Nilai Perusahaan dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan *Price Book Value (PBV)* dengan rumus:

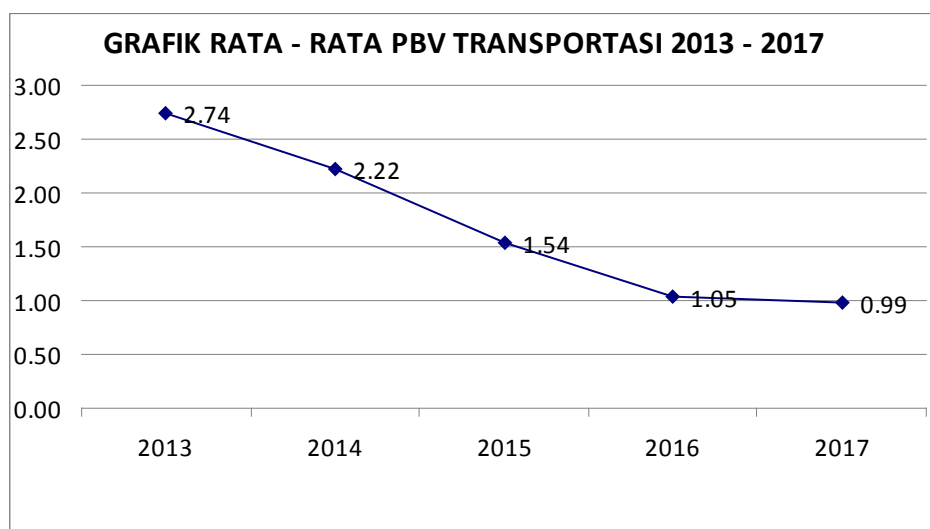
$$PBV = \frac{\text{Harga Pasar per Saham}}{\text{Nilai Buku per Saham}} \times 100\%$$

Tabel 4.6 Rata-rata Nilai Perusahaan

No	Tahun	Rata-rata Nilai Perusahaan (%)
1	2013	2,74
2	2014	2,22
3	2015	1,54
4	2016	1,05
5	2017	0,99

Sumber: Data Diolah (2019)

Grafik 4.6 Hasil Perhitungan Rata-rata Nilai Perusahaan



Sumber: Data diolah (2019)

Berdasarkan grafik 4.6 diketahui bahwa nilai rata-rata Nilai Perusahaan pada tahun 2013-2017 cenderung mengalami penurunan yang signifikan. Pada tahun 2013-2014 mengalami penurunan yaitu dari 2,74 menjadi 2,22. Pada tahun 2015 kembali mengalami penurunan menjadi 1,54. Pada tahun 2016 juga mengalami penurunan menjadi 1,05, dan pada tahun 2017 mengalami penurunan pada level 0,99.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Ferdinand (2006) statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi empiris atas data yang dikumpulkan dalam penelitian. Pada penelitian ini, statistik deskriptif dilihat dari rata-rata (mean), maksimum,

minimum, dan standar deviasi dengan menggunakan Program SPSS sebagai berikut :

Tabel 4.7 Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	70	0,00	79,97	18,104	21,857
X2	70	64,10	80,77	73,553	3,494
X3	70	-359,76	1222,25	83,853	252,489
X4	70	0,00	99,57	57,456	25,044
X5	70	0,25	0,75	0,411	0,125
Y	70	-5,03	18,87	1,707	3,906
Valid N (listwise)	70				

Sumber : Data diolah 2019 menggunakan SPSS

Berdasarkan Tabel 4.7 di atas terlihat bahwa hasil pengujian statistik deskriptif untuk variabel Akuntabilitas (X_1) didapatkan nilai N sebesar 70 perusahaan, dengan nilai minimum 0,000, nilai maximum 79,97, nilai mean sebesar 18,104 dan nilai standar deviasi sebesar 21,857.

Variabel Pertanggungjawaban (X_2) didapatkan nilai N sebesar 70 dengan nilai minimum 64,10 pada variabel Pertanggungjawaban, nilai maximum 80,77 pada variabel Pertanggungjawaban, nilai mean pada variabel Pertanggungjawaban sebesar 73,553 dan nilai standar deviasi pada variabel Pertanggungjawaban 3,494.

Variabel Keterbukaan (X_3) dari hasil pengujian statistik deskriptif untuk variabel Keterbukaan maka di dapatkan nilai N sebesar 70 dengan nilai minimum -359,76 pada variabel Keterbukaan, nilai maximum 1222,25 pada variabel Keterbukaan, nilai mean pada variabel Keterbukaan sebesar 83,853 dan nilai standar deviasi pada variabel Keterbukaan sebesar 252,489.

Variabel Kewajaran (X_4) dari hasil pengujian statistik deskriptif untuk variabel Kewajaran maka di dapatkan nilai N sebesar 70 dengan nilai minimum 0,00 pada variabel Kewajaran, nilai maximum 99,57 pada variabel Kewajaran, nilai mean pada variabel Kewajaran sebesar 57,456 dan nilai standar deviasi pada variabel Kewajaran sebesar 25,044.

Variabel Kemandirian (X_5) dari hasil pengujian statistik deskriptif untuk variabel Kemandirian maka di dapatkan nilai N sebesar 70 dengan nilai minimum 0,25 pada variabel Kemandirian, nilai maximum 0,75 pada variabel Kemandirian, nilai mean pada variabel Kemandirian sebesar 0,411 dan nilai standar deviasi pada variabel Kemandirian sebesar 0,125.

Variabel Nilai Perusahaan (Y) dari hasil pengujian statistik deskriptif untuk variabel Nilai Perusahaan didapatkan nilai N sebesar 70 perusahaan, dengan nilai minimum -5,03, nilai maximum 18,87, nilai mean sebesar 1,707 dan nilai standar deviasi sebesar 3,906.

4.2.2 Hasil Uji Persyaratan Analisis Data

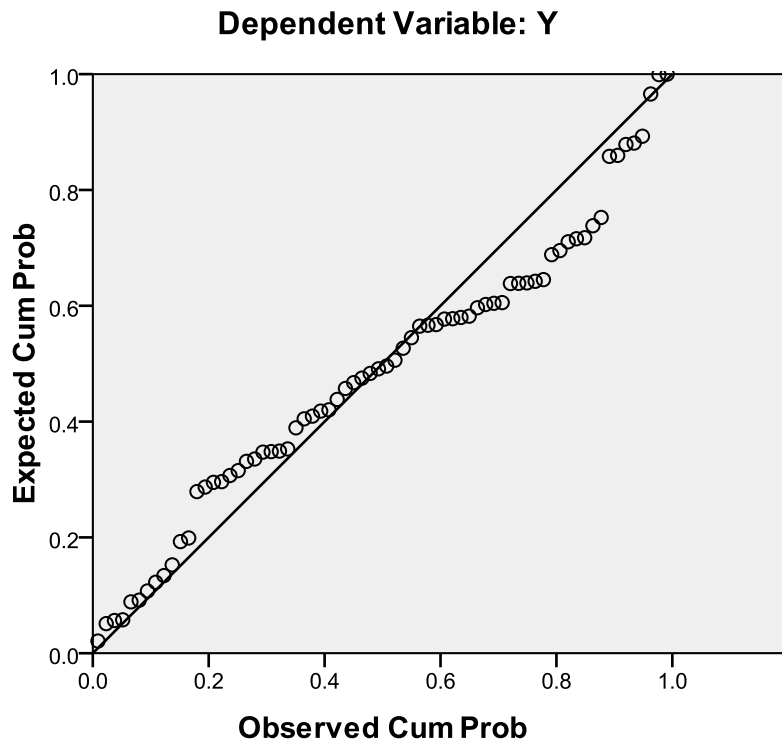
Perhitungan untuk semua uji asumsi klasik pada penelitian ini menggunakan bantuan program *SPSS 20.0 for windows* dan hasil pengolahannya dapat dilihat pada lampiran.

4.2.2.1 Uji Normalitas

Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Uji normalitas data tersebut dapat dilakukan melalui 3 cara yaitu menggunakan Uji Kolmogorof-Smirnov (Uji K-S), grafik histogram dan kurva penyebaran P-Plot.

Untuk Uji K-S yakni jika nilai hasil Uji K-S > dibandingkan taraf signifikansi 0,05 maka sebaran data tidak menyimpang dari kurva normalnya itu uji normalitas. Sedangkan melalui pola penyebaran PPlot dan grafik histogram, yakni jika pola penyebaran memiliki garis normal maka dapat dikatakan data berdistribusi normal. Berikut ini akan disajikan pola penyebaran Pplot.

Gambar 4.7 Pola Penyebaran PPlot



Sumber Data: Pengolahan SPSS, 2019.

Berdasarkan gambar di atas terlihat tersebar mengikuti atau berada di sekitar garis normal. Dengan demikian maka data variabel independen dan variabel dependen yang digunakan dalam model regresi berdistribusi normal.

4.2.2.2 Uji Multikolinieritas

Ghozali (2005) menyatakan bahwa uji ini dimaksudkan untuk mendeteksi gejala korelasi antara variabel independen yang satu dengan variabel independen yang lain. Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi di antara variabel independen. Uji Multikolinieritas dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan melihat VIF (*Variance Inflation Factors*) dan nilai tolerance. Jika $VIF > 10$ dan nilai tolerance $< 0,10$ maka terjadi gejala Multikolinieritas. Dari hasil pengujian diperoleh hasil seperti tabel di bawah ini.

Tabel 4.8 Nilai Tolerance dan VIF

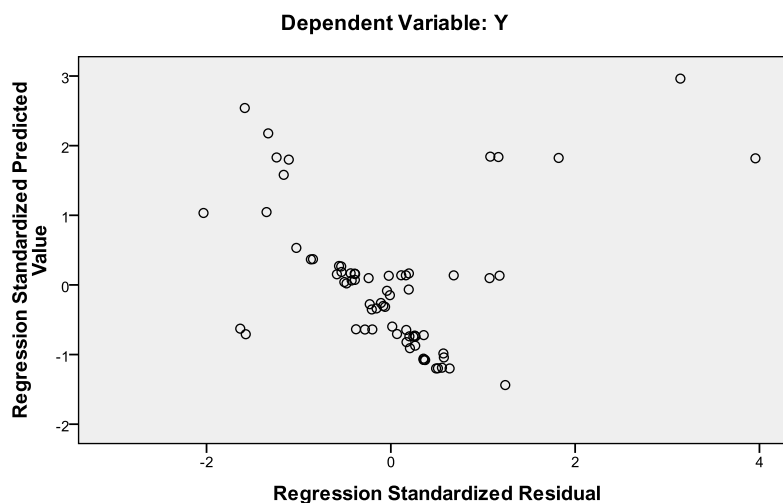
Variabel	<i>Tolerance</i>	VIF
Akuntabilitas	0,337	2,970
Pertanggungjawaban	0,944	1,059
Keterbukaan	0,933	1,071
Kewajaran	0,247	4,049
Kemandirian	0,563	1,775

Hasil di atas terlihat bahwa nilai tolerance masing-masing variabel yaitu variabel Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Keterbukaan, Kewajaran dan Kemandirian mempunyai nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 (10%). Sedangkan untuk nilai VIF secara keseluruhan kurang dari 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa antara variabel independen tidak terdapat gejala multikolonieritas.

4.2.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas ditandai dengan adanya pola tertentu pada grafik *scatterplot*. Jika titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang), maka terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Gambar 4.8. Uji Heteroskedastisitas



Grafik di atas menunjukkan bahwa titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol (0) pada sumbu Y, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat heteroskedastisitas.

4.2.2.4 Uji Autokorelasi

Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah ada korelasi antar anggota sampel atau data pengamatan yang diurutkan berdasarkan waktu, sehingga munculnya suatu data pengamatan dipengaruhi oleh data sebelumnya. Dilihat dari tabel durbin watson bahwa nilai batas dalam (d_u) pada sampel (n) = 70 dengan prediktor (k) = 5 yaitu sebesar 1,7683, sedangkan nilai durbin watson hasil perhitungan yaitu 2,017, dengan demikian diperoleh perhitungan di bawah ini.

$$d_u < d < 4-d_u$$

$$1,7683 < 2,017 < 4-1,7683$$

$$1,7683 < 2,017 < 2,2317$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi, positif, dan negatif atau dengan kata lain nilai perusahaan selain dipengaruhi oleh variabel independen juga dipengaruhi oleh nilai perusahaan pada periode sebelumnya.

4.2.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis inferensial dimaksudkan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yaitu dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Analisis regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel yang diteliti.

Dari hasil pengolahan data dengan menggunakan program komputer SPSS 20.0 *for Windows* yaitu pada Lampiran 7 diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4.9 *Coefficients*

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-2,358	8,312		-,284	-2,358
X1	0,073	0,030	0,407	2,393	0,020
X2	0,008	0,113	0,008	0,074	0,941
X3	0,001	0,002	0,037	0,364	0,717
X4	-0,044	0,031	-0,285	-1,436	0,156
X5	11,261	4,103	0,361	2,745	0,008

Sumber Data: Pengolahan SPSS, 2019.

Berdasarkan hasil tersebut, kemudian dimasukkan ke dalam bentuk persamaan regresi linier berganda, sehingga menjadi persamaan sebagai berikut :

$$Y = - 2,358 + 0,073X_1 + 0,008X_2 + 0,001X_3 - 0,149X_4 + 11,261X_5 + et$$

Interpretasi

Berdasarkan persamaan regresi linier berganda seperti di atas dapat diberikan interpretasi sebagai berikut :

- Nilai konstanta sebesar -2,358 mengandung arti nilai perusahaan akan tetap atau konstan sebesar -2,358 point tanpa adanya akuntabilitas, pertanggungjawaban, keterbukaan, kewajaran dan kemandirian.
- Koefisien regresi X_1 bertanda positif sebesar 0,073 berarti pengaruh akuntabilitas terhadap nilai perusahaan sebesar 0,073 point, atau apabila akuntabilitas meningkat sebesar 1 persen dengan asumsi variabel pertanggungjawaban, keterbukaan, kewajaran dan kemandirian dianggap konstan, maka diprediksikan nilai perusahaan akan meningkat sebesar 0,073 point pada konstanta -2,358.
- Koefisien regresi X_2 bertanda positif sebesar 0,008 berarti pengaruh pertanggungjawaban terhadap nilai perusahaan sebesar 0,008 point, atau apabila variabel pertanggungjawaban meningkat 1 persen, dengan asumsi variabel akuntabilitas, keterbukaan, kewajaran dan kemandirian dianggap

konstan, maka diprediksikan nilai perusahaan akan meningkat 0,008 point pada konstanta -2,358.

- d. Koefisien regresi X_3 bertanda positif sebesar 0,001 berarti pengaruh keterbukaan terhadap nilai perusahaan sebesar 0,001 point, atau apabila variabel keterbukaan meningkat 1 point, dengan asumsi variabel akuntabilitas, pertanggungjawaban, kewajaran dan kemandirian dianggap konstan, maka diprediksikan nilai perusahaan akan meningkat 0,001 point pada konstanta - 2,358.
- e. Koefisien regresi X_4 bertanda negatif sebesar 0,044 berarti pengaruh kewajaran terhadap nilai perusahaan sebesar -0,044 point, atau apabila kewajaran meningkat sebesar 1 persen dengan asumsi variabel akuntabilitas, pertanggungjawaban, keterbukaan, dan kemandirian dianggap konstan, maka diprediksikan nilai perusahaan akan menurun 0,044 point pada konstanta - 2,358.
- f. Koefisien regresi X_5 bertanda positif sebesar 11,261 berarti pengaruh kemandirian terhadap nilai perusahaan sebesar 11,261 point, atau apabila kemandirian meningkat sebesar 1 orang dengan asumsi variabel akuntabilitas, pertanggungjawaban, keterbukaan, dan kewajaran dianggap konstan, maka diprediksikan nilai perusahaan akan menurun 11,261 point pada konstanta - 2,358.

4.2.4 Uji Hipotesis

4.2.4.1 Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Nilai Perusahaan

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat dijelaskan secara rinci dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.10 Uji t untuk Variabel Akuntabilitas terhadap Nilai Perusahaan

Variabel	t_{hitung}	$t_{tabel} (n-2; \alpha 0,05)$	Kondisi	Kesimpulan
Akuntabilitas	2,393 (sig. 0,020)	1,995	$t_{hitung} > t_{tabel}$ (0,020 > 0,05)	Ho diterima dan Ha ditolak

Untuk variabel akuntabilitas, diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 2,393 lebih besar dari nilai t_{tabel} (1,995) atau dengan kata lain $t_{hitung} > t_{tabel}$, sedangkan hasil *significant* yang diperoleh sebesar 0,020 lebih kecil dari α yang ditentukan yaitu 0,05 sehingga dapat dikatakan signifikan. Dengan demikian, H_0 ditolak dan H_a diterima, atau dengan kata lain akuntabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal ini mengandung arti bahwa apabila adanya penambahan jumlah akuntabilitas maka akan meningkatkan nilai perusahaan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) di masa yang akan datang.

4.2.4.2 Pengaruh Pertanggungjawaban Terhadap Nilai Perusahaan

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat dijelaskan secara rinci dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.11 Uji t untuk Variabel Pertanggungjawaban terhadap Nilai Perusahaan

Variabel	t_{hitung}	$t_{tabel} (n-2; \alpha 0,05)$	Kondisi	Kesimpulan
Pertanggung-jawaban	0,074 (sig. 0,941)	1,995	$t_{hitung} < t_{tabel}$ (0,941 > 0,05)	H_0 ditolak dan H_a diterima

Untuk variabel pertanggungjawaban diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 0,074 lebih kecil dari nilai t_{tabel} (1,995) atau dengan kata lain $t_{hitung} < t_{tabel}$, sedangkan hasil *significant* yang diperoleh sebesar 0,941 lebih besar dari α yang ditentukan yaitu 0,05 sehingga dapat dikatakan tidak signifikan. Dengan demikian, H_0 diterima dan H_a ditolak, atau dengan kata lain pertanggungjawaban tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal ini mengandung arti bahwa apabila ada penambahan jumlah pertanggungjawaban yang diterapkan maka tidak akan meningkatkan nilai perusahaan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) di masa yang akan datang.

4.2.4.3 Pengaruh Keterbukaan Terhadap Nilai Perusahaan

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat dijelaskan secara rinci dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.12 Uji t untuk Variabel Keterbukaan terhadap Nilai Perusahaan

Variabel	t_{hitung}	$t_{tabel} (n-2; \alpha 0,05)$	Kondisi	Kesimpulan
Keterbukaan	0,364 (sig. 0,717)	1,995	$t_{hitung} < t_{tabel}$ (0,717 > 0,05)	Ho ditolak dan Ha diterima

Untuk variabel keterbukaan diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 0,364 lebih kecil dari nilai t_{tabel} (1,995) atau dengan kata lain $t_{hitung} < t_{tabel}$, sedangkan hasil *significant* yang diperoleh sebesar 0,717 lebih besar dari α yang ditentukan yaitu 0,05 sehingga dapat dikatakan tidak signifikan. Dengan demikian, Ho diterima dan Ha ditolak, atau dengan kata lain keterbukaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal ini mengandung arti bahwa apabila ada penambahan jumlah keterbukaan yang diterapkan maka tidak akan meningkatkan nilai perusahaan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) di masa yang akan datang.

4.2.4.4 Pengaruh Kewajaran Terhadap Nilai Perusahaan

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat dijelaskan secara rinci dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.13 Uji t untuk Variabel Kewajaran terhadap Nilai Perusahaan

Variabel	t_{hitung}	$t_{tabel} (n-2; \alpha 0,05)$	Kondisi	Kesimpulan
Kewajaran	-1,436 (sig. 0,156)	-1,995	$-t_{hitung} > -t_{tabel}$ (0,156 > 0,05)	Ho diterima dan Ha ditolak

Untuk variabel kewajaran, diperoleh nilai $-t_{hitung}$ sebesar -1,436 lebih besar dari nilai $-t_{tabel}$ (-1,995) atau dengan kata lain $-t_{hitung} > -t_{tabel}$, sedangkan hasil *significant* yang diperoleh sebesar 0,156 lebih besar dari α yang ditentukan yaitu 0,05 sehingga dapat dikatakan tidak signifikan. Dengan demikian, Ho diterima

dan H_a ditolak, atau dengan kata lain kewajaran tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal ini mengandung arti bahwa apabila adanya penambahan jumlah kewajaran maka akan menurunkan nilai perusahaan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) di masa yang akan datang.

4.2.4.5 Pengaruh Kemandirian Terhadap Nilai Perusahaan

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat dijelaskan secara rinci dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.14 Uji t untuk Variabel Kemandirian terhadap Nilai Perusahaan

Variabel	t_{hitung}	$t_{tabel} (n-2; \alpha 0,05)$	Kondisi	Kesimpulan
Kemandirian	2,745 (sig. 0,008)	1,995	$t_{hitung} > t_{tabel}$ (0,008 < 0,05)	H_0 ditolak dan H_a diterima

Untuk variabel kemandirian, diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 2,745 lebih besar dari nilai t_{tabel} (1,995) atau dengan kata lain $t_{hitung} > t_{tabel}$, sedangkan hasil *significant* yang diperoleh sebesar 0,008 lebih kecil dari α yang ditentukan yaitu 0,05 sehingga dapat dikatakan signifikan. Dengan demikian, H_0 ditolak dan H_a diterima, atau dengan kata lain kemandirian berpengaruh terhadap nilai perusahaan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal ini mengandung arti bahwa apabila adanya penambahan jumlah kemandirian maka akan meningkatkan nilai perusahaan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) di masa yang akan datang.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Nilai Perusahaan

Prinsip akuntabilitas memuat kewenangan yang harus dimiliki oleh dewan komisaris dan dewan direksi, beserta kewajibannya kepada pemegang saham dan *stakeholders* lainnya. Dewan direksi, bertanggung jawab atas keberhasilan pengelolaan perusahaan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh

pemegang saham. Dewan komisaris, bertanggung jawab atas keberhasilan pengawasan dan wajib memberikan nasehat kepada direksi atas pengelolaan perusahaan, sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Prinsip akuntabilitas dalam hal ini diprosikan oleh kepemilikan manajemen.

Menurut Haruman (2016) kepemilikan manajemen adalah proporsi pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan. Dengan adanya kepemilikan manajemen dalam sebuah perusahaan, akan menimbulkan dugaan yang menarik bahwa nilai perusahaan meningkat sebagai akibat kepemilikan manajemen yang meningkat. Kepemilikan oleh manajemen yang besar akan efektif dalam memonitoring aktivitas perusahaan. Semakin besar kepemilikan saham oleh manajemen, maka berkurang kecenderungan manajemen untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya, sehingga mengakibatkan kenaikan nilai perusahaan dan ketika kepemilikan saham oleh manajemen rendah, maka ada kecenderungan terjadinya perilaku *opportunistic* manajer yang akan meningkat pula.

Berdasarkan dari pengujian hipotesis pertama, bahwa terdapat pengaruh akuntabilitas terhadap nilai perusahaan transportasi yang terdaftar di BEI. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai koefisien regresi sebesar 0,073 dengan nilai signifikansi sebesar $0,020 < 0,05$, menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan Transportasi yang terdaftar di BEI.

Kepemilikan manajemen terhadap saham perusahaan dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara pemegang saham luar dan manajemen, sehingga permasalahan keagenan diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer adalah juga sekaligus sebagai seorang pemilik. Manajer yang sekaligus pemegang saham akan meningkatkan nilai perusahaan, sehingga nilai kekayaannya sebagai pemegang saham akan meningkat juga. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Salafuddin (2016), menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan *consumer*

goods industry artinya hal ini di duga manajer mampu mengelola asset perusahaan dengan baik ketika memiliki sebagian saham perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

4.3.2 Pengaruh Pertanggungjawaban Terhadap Nilai Perusahaan

Prinsip pertanggungjawaban menuntut perusahaan maupun pimpinan dan manajer perusahaan melakukan kegiatannya secara bertanggung jawab. Tanggung jawab perusahaan dalam hal ini merupakan tanggung jawab kepada sosial atau lebih dikenal dengan *corporate social responsibility*. Pengungkapan *corporate social responsibility* merupakan proses komunikasi dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Hal tersebut memperluas tanggung jawab organisasi (khususnya perusahaan) di luar peran tradisionalnya untuk menyediakan laporan keuangan kepada pemilik modal khususnya pemegang saham. Perluasan tersebut dibuat dengan asumsi bahwa perusahaan mempunyai tanggung jawab yang lebih luas dibanding hanya mencari laba untuk pemegang saham.

Berdasarkan dari pengujian hipotesis kedua, bahwa terdapat pengaruh pertanggungjawaban terhadap nilai perusahaan transportasi yang terdaftar di BEI. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai koefisien regresi sebesar 0,008 dengan nilai signifikansi sebesar $0,941 > 0,05$, menunjukkan bahwa pertanggungjawaban tidak berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan Transportasi yang terdaftar di BEI.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2016) memperlihatkan bahwa Nilai perusahaan tidak dipengaruhi oleh *Corporate social responsibility*. Nilai perusahaan akan dipengaruhi oleh *corporate social responsibility* dengan dimoderasi oleh ukuran perusahaan dan jumlah dewan komisaris.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pertanggungjawaban tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

4.3.3 Pengaruh Keterbukaan Terhadap Nilai Perusahaan

Adanya prinsip keterbukaan, maka informasi harus diungkapkan secara tepat waktu dan akurat. Informasi yang diharapkan antara lain keadaan keuangan, kinerja keuangan, kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Prinsip keterbukaan dalam GCG ini dilakukan agar pemegang saham dan orang lain mengetahui keadaan perusahaan, sehingga nilai pemegang saham dapat ditingkatkan. Prinsip keterbukaan dalam hal ini diwujudkan dalam bentuk *Earning Per Share* (EPS).

Earning per share atau laba per lembar saham adalah keuntungan bersih untuk tiap lembar sahamnya yang mampu diraih perusahaan pada saat menjalankan operasinya. *Earning per share* adalah rasio yang menunjukkan pendapatan yang diperoleh setiap lembar saham.

Hasil pengujian hipotesis ketiga memperlihatkan bahwa untuk variabel keterbukaan diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 0,364 lebih kecil dari nilai t_{tabel} (1,995) atau dengan kata lain $t_{hitung} < t_{tabel}$, sedangkan hasil *significant* yang diperoleh sebesar 0,717 lebih besar dari α yang ditentukan yaitu 0,05 sehingga dapat dikatakan tidak signifikan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mindra (2014) diperoleh hasil *Earning Per Share*, Ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage secara bersama-sama berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Secara parsial variabel profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan dan variabel *earning per share* dan leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keterbukaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

4.3.4 Pengaruh Kewajaran Terhadap Nilai Perusahaan

Prinsip kewajaran mengandung arti bahwa seluruh pemangku kepentingan harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan perlakuan yang adil dari perusahaan. Setiap anggota direksi harus melakukan keterbukaan jika menemukan transaksi-transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Prinsip kewajaran dalam hal ini merupakan bentuk kepemilikan institusional.

Tarjo (2012) mengemukakan bahwa kepemilikan institusional merupakan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain. Kepemilikan institusional bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan pada umumnya dan manajer sebagai pengelola perusahaan pada khususnya. Semakin besar kepemilikan institusional, maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan dan diharapkan juga dapat bertindak sebagai pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan oleh manajemen (Faisal, 2015).

Hasil pengujian hipotesis keempat untuk variabel kewajaran, diperoleh nilai $-t_{hitung}$ sebesar -1,436 lebih besar dari nilai $-t_{tabel}$ (-1,995) atau dengan kata lain $-t_{hitung} > -t_{tabel}$, sedangkan hasil *significant* yang diperoleh sebesar 0,156 lebih besar dari α yang ditentukan yaitu 0,05 sehingga dapat dikatakan tidak signifikan.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Salafudin (2016) bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan *consumer goods industry*. Hal ini dimungkinkan rapat kewajaran yang diadakan oleh kewajaran belum teragendakan dengan baik. Sehingga kewajaran bukan jaminan bagi perusahaan untuk mendapat kepercayaan dari investor.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kewajaran tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

4.3.5 Pengaruh Kemandirian Terhadap Nilai Perusahaan

Prinsip kemandirian dalam GCG menuntut para pengelola perusahaan agar dapat bertindak secara mandiri, sesuai peran dan fungsi yang dimilikinya tanpa ada tekanan-tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan sistem operasional perusahaan yang berlaku. Prinsip kemandirian dalam hal ini merupakan bentuk dari Dewan Komisaris Independen.

Board independent atau dewan komisaris independen adalah jumlah dewan komisaris independen dalam perusahaan. Jumlah dewan komisaris independen yang semakin banyak menandakan bahwa dewan komisaris independen melakukan fungsi pengawasan dan koordinasi dalam perusahaan yang semakin baik (Wulandari, 2013). Dewan komisaris memegang peranan penting dalam perusahaan terutama dalam pelaksanaan GCG. Dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang ditugaskan untuk menjamin strategi perusahaan, mengawasi manajer dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Karena dewan komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi manajemen yang bertugas meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan, maka dewan komisaris merupakan pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan.

Untuk variabel kemandirian, diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 2,745 lebih besar dari nilai t_{tabel} (1,995) atau dengan kata lain $t_{hitung} > t_{tabel}$, sedangkan hasil *significant* yang diperoleh sebesar 0,008 lebih kecil dari α yang ditentukan yaitu 0,05 sehingga dapat dikatakan signifikan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alfinur (2016), menunjukkan bahwa komisaris Independen berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Adanya pengaruh positif tersebut disebabkan oleh mekanisme

control yang kuat dari komisaris independen terhadap manajemen, dimana mekanisme kontrol tersebut merupakan peran vital bagi terciptanya GCG.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kemandirian berpengaruh terhadap nilai perusahaan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis setiap variabel penelitian maka dapat dirumuskan simpulan sebagai berikut :

1. Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Pertanggungjawaban tidak berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
3. Keterbukaan tidak berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
4. Kewajaran tidak berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
5. Kemandirian berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, serta penelusuran setiap item variabel penelitian maka dapat dirumuskan saran sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti kembali penelitian yang mengambil permasalahan yang sama diharapkan untuk dapat melakukan penelitian dengan menambah variabel lainnya, selain prinsip dan mekanisme GCG seperti kinerja keuangan.

2. Bagi Perusahaan

Perusahaan Transportasi hendaknya memperhatikan kembali penerapan prinsip *Good Corporate Governance* yang dilakukan selama ini, terutama dengan memperbaiki prinsip pertanggungjawaban, keterbukaan, dan kewajaran karena tidak mempengaruhi nilai perusahaan.

3. Bagi Investor

Investor sebaiknya memperhatikan kembali keputusannya untuk berinvestasi pada perusahaan transportasi terutama dilihat dari prinsip GCG pada perusahaan transportasi karena hanya 2 (dua) prinsip yang mampu memberikan dampak pada nilai perusahaan, sehingga tidak mampu menjamin keberlangsungan perusahaan dalam meningkatkan kinerja keuangan di masa mendatang.